

Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN

untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem
Sertifikasi Kompetensi



Satu Visi
Satu Identitas
Satu Komunitas



Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi



Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kantor Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, Indonesia.

Untuk pertanyaan, hubungi: Sekretariat ASEAN
Divisi Hubungan Masyarakat (*Community Relations Division/CRD*)
70A Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110 Indonesia
Telepon : (62 21) 724-3372, 726-2991
Faks : (62 21) 739-8234, 724-3504
Surel : public@asean.org

Data Publikasi Katalog

Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi
Jakarta, Sekretariat ASEAN, Agustus 2016

331.114

1. ASEAN – Standar – Sumber Daya Manusia
2. Kualifikasi – Keterampilan – Panduan

ISBN 978-602-5798-60-3



ASEAN: A Community of Opportunities

Teks publikasi ini dapat dikutip atau dicetak ulang dengan bebas, asalkan diberikan pengakuan yang benar dan salinan yang berisi materi cetak ulang dikirim kepada Divisi Hubungan Masyarakat (*Community Relations Division/CRD*) di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Informasi umum tentang ASEAN dapat dilihat secara daring di Situs Web ASEAN: www.asean.org

Hak Cipta: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2016.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Kata Pengantar

Prinsip-prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi adalah sebuah proyek yang direncanakan dalam Program Kerja Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN 2010-2015 dan dikembangkan oleh Pertemuan Para Pejabat Senior Kementerian Tenaga Kerja ASEAN (SLOM) di bawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Sekretariat ASEAN. Prinsip-prinsip Panduan ASEAN ini diadopsi oleh Pertemuan Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM) ke-24 yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2016 di Vientiane, Laos.

Prinsip-prinsip Panduan ASEAN ini bertujuan untuk memberikan dasar guna mengembangkan kepercayaan dan pemahaman tentang kerangka nasional dan sistem sertifikasi kompetensi semua Negara Anggota ASEAN serta menyediakan pokok-pokok dan protokol-protokol guna mengembangkan proses untuk pengakuan sistem ini. Sinergi dengan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQRF) dipertimbangkan dalam pembuatan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN ini karena diharapkan hal ini dapat melengkapi AQRF. Di masa depan, penggunaan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN ini akan bersifat sukarela oleh Negara-Negara Anggota ASEAN yang siap melakukan pembuatan referensi silang (*cross-referencing*) dari standar keterampilan negara-negara tersebut untuk pekerjaan tertentu.

Penghargaan diberikan kepada Pertemuan Para Pejabat Senior Kementerian Tenaga Kerja ASEAN dari kesepuluh Negara Anggota ASEAN untuk berbagi pengetahuan dan dukungan selama proses penyusunan dan penelaahan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN ini. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Jepang atas dukungannya yang berkelanjutan melalui Dana Integrasi Jepang-ASEAN (JAIF) terhadap pengembangan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN ini. Tak kalah pentingnya, kami ucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada konsultan, Ibu Andrea Bateman, dan koordinator proyek, Bapak Bonardo Aldo Tobing, atas dukungan teknis yang telah diberikan.

Daftar Isi

Daftar tabel	1
Akronim	2
Glosari istilah-istilah kunci	3
Pendahuluan	7
Bab 1: Gambaran Umum Kerangka Kualifikasi Nasional (NQF) Negara-Negara Anggota ASEAN	10
Bab 2: Gambaran Umum Sistem Sertifikasi Kompetensi Negara-Negara Anggota ASEAN	16
Bab 3: Aspek-Aspek Kunci Penjaminan Mutu	26
Bab 4: Prinsip Panduan dan Protokol untuk Penjaminan Mutu	36
Bab 5: Prinsip Panduan dan Protokol untuk Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi di antara Negara-Negara Anggota ASEAN	42
Bab 6: Berpartisipasi dalam Kegiatan Pembuatan Referensi Nasional	46
Lampiran: Kerangka Penjaminan Mutu Internasional	49
Referensi	52
Badan yang Kompeten dari Negara-Negara Anggota ASEAN	53

Daftar tabel

Tabel 1: Rangkuman NQF	10
Tabel 2: Rangkuman struktur NQF	11
Tabel 3: Kerangka Kualifikasi Nasional Thailand	17
Tabel 4: Tingkat keterampilan	18
Tabel 5: Tingkat kualifikasi keterampilan nasional Vietnam	18
Tabel 6: Definisi kompetensi	20
Tabel 7: Indikator mutu, EAS TVET QAF	50

Akronim

ALMM	Pertemuan Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN
AMS	Negara-Negara Anggota ASEAN
AQRF	Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
EAS TVET QAF	Kerangka Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan KTT Asia Timur
HRD	Pengembangan Sumber Daya Manusia
INQAAHE	Jaringan Internasional untuk Lembaga Penjaminan Mutu dalam Pendidikan Tinggi
MOU	Nota Kesepahaman
NQF	Kerangka Kualifikasi Nasional
QF	Kerangka Kualifikasi
SLOM	Pertemuan Para Pejabat Senior Kementerian Tenaga Kerja ASEAN
TVET	Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan dan Teknis

Glosari istilah-istilah kunci

Istilah-istilah kunci berikut ini adalah istilah yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. Istilah-istilah yang ditandai dengan [*] adalah istilah yang secara khusus disetujui dalam Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN.

Istilah	Definisi
Akreditasi*	Persetujuan resmi atas standar-standar pencapaian, termasuk kualifikasi atau unit kualifikasi, biasanya untuk periode waktu tertentu, karena dapat memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh lembaga akreditasi.
Kualifikasi terakreditasi*	Kualifikasi yang telah disetujui oleh lembaga atau organisasi akreditasi karena telah memenuhi persyaratan atau standar mutu tertentu.
Lembaga akreditasi*	Lembaga akreditasi adalah badan yang kompeten (seperti lembaga kualifikasi nasional, lembaga akreditasi nasional, dewan peninjau resmi atau badan atau lembaga yang disetujui secara nasional dengan tanggung jawab untuk menyetujui kualifikasi) yang mengelola akreditasi program dan kualifikasi berdasarkan undang-undang nasional. Lembaga akreditasi berfungsi dalam sistem penjaminan mutu.
Standar-standar pencapaian	<p>Pernyataan disetujui dan diresmikan oleh badan yang kompeten, yang menetapkan aturan yang harus diikuti dalam konteks tertentu atau hasil yang ingin dicapai. Perbedaan dapat dibuat antara standar kompetensi, pendidikan, pekerjaan atau sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan/atau kompetensi yang terkait dengan praktik pekerjaan • Standar pendidikan mengacu pada pernyataan tujuan pembelajaran, isi kurikulum, persyaratan masuk dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran • Standar penilaian mengacu pada pernyataan hasil belajar yang akan dinilai dan metodologi yang digunakan • Standar pekerjaan mengacu pada pernyataan kegiatan dan tugas yang terkait dengan pekerjaan tertentu dan praktiknya, dan • Standar sertifikasi mengacu pada pernyataan aturan yang berlaku untuk memperoleh kualifikasi (mis., sertifikat atau ijazah) serta hak-hak yang diberikan.¹
ASEAN Kerangka Acuan Kualifikasi*	Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN, kerangka acuan umum, berfungsi sebagai perangkat untuk memungkinkan perbandingan kualifikasi di seluruh negara anggota ASEAN.
Sertifikasi	Proses penerbitan sertifikat, ijazah atau gelar dari hasil belajar secara formal yang membuktikan bahwa serangkaian hasil belajar (pengetahuan, keahlian, keterampilan dan/atau kompetensi) yang diperoleh oleh seseorang telah dinilai dan disahkan oleh badan yang kompeten terhadap standar yang telah ditentukan. ²
Skema sertifikasi	Skema sertifikasi adalah kompetensi dan persyaratan lain yang terkait dengan kategori pekerjaan tertentu. ³ Skema sertifikasi dapat menghasilkan sertifikat yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah memenuhi persyaratan, atau disertakan dalam kualifikasi.

¹ Cedefop (2011), hlm. 109.

² Cedefop (2011), hlm. 16

³ Diadaptasi dari ISO/IEC 17024:2012

Badan pemberi dan/atau penerbit sertifikasi*	Badan yang menerbitkan kualifikasi (mis., sertifikat, ijazah atau gelar) secara resmi mengakui pencapaian hasil belajar (pengetahuan, keterampilan dan/atau kompetensi) seseorang, yang mengikuti prosedur penilaian dan pengesahan. ⁴
Kompetensi*	Kompetensi adalah kemampuan yang melampaui penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi kognitif yang melibatkan penggunaan teori dan konsep, serta pengetahuan implisit informal yang diperoleh melalui pengalaman • Kompetensi fungsional (keterampilan atau keahlian), hal-hal yang harus dapat dilakukan seseorang ketika mereka bekerja dalam bidang tertentu • Kompetensi pribadi yang melibatkan pengetahuan tentang cara memosisikan diri dalam situasi tertentu, dan • Kompetensi etis yang melibatkan penguasaan nilai pribadi dan profesional tertentu.⁵
Standar kompetensi*	Pernyataan yang disetujui dan diresmikan oleh badan yang kompeten, yang menetapkan aturan yang harus diikuti dalam konteks tertentu atau hasil yang ingin dicapai. Standar kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan/atau kompetensi yang terkait dengan praktik pekerjaan. ⁶
Standar pekerjaan*	Pernyataan yang disetujui dan diresmikan oleh badan yang kompeten, yang menetapkan aturan yang harus diikuti dalam konteks tertentu atau hasil yang ingin dicapai. Standar pekerjaan mengacu pada pernyataan kegiatan dan tugas yang terkait dengan pekerjaan tertentu dan praktiknya. ⁷
Penyedia*	Organisasi yang merencanakan dan memberikan layanan pendidikan/pelatihan dan penilaian yang sering mengarah pada pemberian kualifikasi atau komponen kualifikasi.
Kualifikasi*	Kualifikasi adalah sertifikat resmi yang diterbitkan oleh lembaga resmi, sebagai pengakuan bahwa seseorang telah dinilai mencapai hasil belajar atau kompetensi dengan standar yang telah ditentukan untuk gelar kualifikasi, biasanya jenis sertifikat, ijazah atau gelar akademik. Pembelajaran dan penilaian untuk kualifikasi dapat dilakukan melalui pengalaman di tempat kerja dan/atau program studi. Kualifikasi memberikan pengakuan nilai secara resmi di pasar tenaga kerja dan dalam pendidikan serta pelatihan lebih lanjut. ⁸
Kerangka kualifikasi*	Instrumen untuk pengembangan dan klasifikasi kualifikasi (mis., di tingkat nasional atau sektoral) sesuai dengan serangkaian kriteria (mis., penggunaan deskriptor) yang berlaku untuk tingkat hasil belajar yang telah ditentukan. ⁹

⁴ Cedefop (2011), hlm. 10 & 11

⁵ Coles & Werquin (2006), hlm. 23

⁶ Cedefop (2011), hlm. 109

⁷ Cedefop (2011), hlm. 109

⁸ Coles & Werquin (2006) hlm. 21 & 22

⁹ Cedefop (2011), hlm. 82

Sistem kualifikasi*	Sistem kualifikasi mencakup semua aspek kegiatan dari suatu negara yang menghasilkan pengakuan pembelajaran. Sistem ini meliputi cara mengembangkan dan mengoperasionalkan kebijakan nasional atau regional tentang kualifikasi, pengaturan kelembagaan, proses penjaminan mutu, proses penilaian dan penerbitan, pengakuan keterampilan dan mekanisme lain yang menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan pasar tenaga kerja dan masyarakat sipil. Sistem kualifikasi mungkin lebih atau kurang terintegrasi dan koheren. Salah satu fitur dari sistem kualifikasi dapat berupa kerangka kualifikasi yang eksplisit. ¹⁰
Penjaminan mutu*	Penjaminan mutu adalah komponen manajemen mutu yang berfokus untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi. ¹¹ Sehubungan dengan layanan pendidikan dan pelatihan, penjaminan mutu mengacu pada proses terencana dan sistematis yang memberikan keyakinan pada desain, pelaksanaan(maksudnya delivery) dan penerbitan kualifikasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan. Penjaminan mutu memastikan kepentingan dan investasi pemangku kepentingan dalam program terakreditasi terlindungi.
Kerangka penjaminan mutu*	Serangkaian prinsip, panduan, alat, dan standar yang bertindak sebagai referensi untuk memandu penerapan kegiatan penjaminan mutu yang konsisten.
Indikator mutu*	Angka atau rasio yang diakui secara formal dan digunakan sebagai tolok ukur untuk menyimpulkan dan menilai kinerja yang bermutu. ¹²
Prinsip mutu*	Niat dan arahan secara keseluruhan dari kerangka mutu atau organisasi terkait dengan penjaminan mutu.
Standar-standar mutu*	Spesifikasi teknis yang dapat diukur dan telah disusun melalui konsensus dan disetujui oleh organisasi yang diakui di tingkat regional, nasional atau internasional. Tujuan standar mutu adalah optimalisasi masukan dan/atau keluaran pembelajaran. ¹³
Sistem penjaminan mutu*	Sistem penjaminan mutu mencakup semua aspek kegiatan dari suatu negara yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan. Sistem ini meliputi elemen-elemen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan standar yang jelas dan terukur, panduan pelaksanaan, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan • Sumber daya yang tepat • Metode evaluasi yang konsisten, yang mengaitkan penilaian diri dan tinjauan eksternal • Mekanisme dan prosedur umpan balik untuk perbaikan, dan • Hasil evaluasi yang dapat diakses secara luas

¹⁰ Coles & Werquin (2006), hlm. 22

¹¹ AS/NZS ISO 9000:2006, hlm. 9

¹² Cedefop Glossary (2011), hlm. 88

¹³ Cedefop Glossary (2011), hlm. 96

<p>Pengakuan</p>	<p>Pengakuan resmi adalah proses pemberian status hasil belajar resmi untuk keterampilan dan kompetensi baik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kualifikasi (sertifikat, ijazah atau gelar) sebagai hasil penilaian, atau • Pemberian kesetaraan, unit kredit atau keringanan, pengesahan keterampilan dan/atau kompetensi yang diperoleh. <p>Pengakuan sosial adalah pengakuan atas nilai keterampilan dan/atau kompetensi oleh para pemangku kepentingan ekonomi dan sosial.¹⁴</p>
<p>Pembuatan Referensi*</p>	<p>Pembuatan Referensi adalah proses yang menghasilkan pembentukan hubungan antara kerangka kualifikasi nasional dan kerangka kualifikasi regional.</p>
<p>Kerangka kualifikasi regional*</p>	<p>Struktur tingkat hasil belajar yang luas yang disepakati oleh negara-negara di wilayah geografis. Suatu cara untuk memungkinkan satu kerangka kualifikasi nasional untuk berhubungan dengan kerangka yang lain dan, selanjutnya, untuk kualifikasi di satu negara guna dibandingkan dengan kualifikasi dari negara lain.</p>
<p>Lembaga yang mendaftar*</p>	<p>Lembaga yang mendaftar adalah badan kompeten yang bertanggung jawab untuk menyetujui penyedia pendidikan dan pelatihan, misalnya, lembaga kualifikasi nasional, dewan peninjau resmi atau badan atau lembaga lain yang disetujui secara nasional. Lembaga yang mendaftar berfungsi dalam sistem penjaminan mutu.</p>
<p>Pencatatan penyedia*</p>	<p>Proses pencatatan meliputi pengakuan resmi oleh lembaga yang mendaftar bahwa penyedia memenuhi standar-standar mutu yang relevan. Di bawah NQF, biasanya penyedia didaftarkan untuk memberikan dan menilai program terakreditasi serta mengeluarkan penghargaan.</p> <p>Beberapa lembaga membedakan dua proses tersebut, mis.,:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan resmi bahwa penyedia memenuhi standar-standar umum utama • Pengakuan resmi bahwa penyedia memenuhi standar khusus terkait dengan penyediaan pengajaran, pembelajaran dan penilaian program tertentu. <p>Untuk tujuan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN, pencatatan penyedia adalah istilah yang digunakan untuk kedua proses tersebut.</p>

¹⁴ Diadaptasi dari Cedefop (2011), hlm. 97

Pendahuluan

Piagam ASEAN, yang ditandatangani oleh sepuluh Pemimpin ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007, bertujuan untuk: “menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi di mana terdapat arus barang, jasa, dan investasi yang bebas; pergerakan yang difasilitasi oleh pelaku bisnis, tenaga profesional, tenaga ahli dan tenaga kerja; dan aliran modal yang bebas” serta “mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat dalam pendidikan dan pembelajaran seumur hidup dan dalam sains dan teknologi, untuk pemberdayaan masyarakat ASEAN dan untuk penguatan Komunitas ASEAN”.¹⁵

Pada tahun 2007, Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS)¹⁶ mengadopsi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (ASEAN 2007). Hal ini menyerukan kerja sama, termasuk pengakuan kualifikasi tenaga profesional. Selain Pengaturan Saling Pengakuan (MRA) di bidang Teknik dan Keperawatan yang ditandatangani masing-masing pada tahun 2005 dan 2006, lima MRA disimpulkan antara tahun 2007 dan 2009 di bidang arsitektur, survei, praktik dokter medis dan gigi serta akuntansi. Komponen penting lainnya dari Cetak Biru MEA adalah penciptaan aliran bebas tenaga kerja terampil melalui “harmonisasi dan standardisasi” (ASEAN 2007:18), khususnya dalam persiapan untuk MEA tahun 2015.

Untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, kegiatan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) akan memainkan peran penting pada pertumbuhan ekonomi di setiap ekonomi ASEAN yang membawa kontribusi besar bagi pembangunan regional secara luas. Sebagaimana diketahui, keberhasilan semua kegiatan HRD sangat tergantung pada proses pembelajaran, pelatihan, dan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Karena akan ada mobilitas intensif dan pertukaran tenaga kerja di pasar ASEAN, salah satu faktor kunci keberhasilan adalah pengakuan terhadap kompetensi dan keterampilan masyarakat. Masalah sebenarnya yang dihadapi oleh masing-masing ekonomi dalam mengakui kompetensi dan keterampilan seseorang adalah tidak adanya panduan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk kebutuhan pengakuan silang tersebut. Tanpa adanya panduan dan sistem sertifikasi tersebut, diperkirakan akan ada banyak masalah yang berpotensi menghadang semua negara yang terkait dengan kegiatan HRD seperti: (i) perekrutan sumber daya manusia; (ii) persyaratan proyek; (iii) kepatuhan kualifikasi; (iv) standar kompetensi/keterampilan.

Saat ini, setiap Negara Anggota ASEAN (AMS) memiliki kerangka nasional sendiri terkait dengan kegiatan HRD-nya. Salah satu fungsi dari kerangka tersebut adalah sebagai referensi untuk mengakui berbagai jenis kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia dalam wilayah lintas industri. Terdapat 10 (sepuluh) kerangka berbeda dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki ciri uniknya sendiri. Setelah integrasi satu pasar ASEAN, kesepuluh kerangka ini akan digunakan secara bersamaan oleh ekonomi-ekonomi sebagai infrastruktur dalam kegiatan HRD.

Panduan ini memberikan dasar untuk mengembangkan kepercayaan dan pemahaman tentang sistem sertifikasi kompetensi ini, dan bertujuan untuk memberikan prinsip dan protokol guna mengembangkan proses untuk pengakuan sistem ini.

Panduan tersebut meliputi:

- Gambaran Umum Kerangka Kualifikasi Nasional AMS (Bab 1)
- Gambaran Umum Sistem Sertifikasi Kompetensi AMS (Bab 2)

¹⁵ Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (2007), Bab 1, Pasal 1, ayat 5 dan 10

¹⁶ Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam

- Diskusi aspek-aspek utama dari penjaminan mutu (Bab 3)
- Prinsip panduan dan protokol yang disepakati untuk penjaminan mutu yang terkait dengan badan yang kompeten dan penyedia layanan penilaian (Bab 4)
- Prinsip panduan dan protokol yang disepakati untuk pengakuan sistem sertifikasi kompetensi (Bab 5)
- Gambaran umum AQRF dan cara bagi badan yang kompeten untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan referensi nasional (Bab 6).

Panduan ini juga mencakup terminologi regional yang disepakati untuk memfasilitasi diskusi antara AMS.

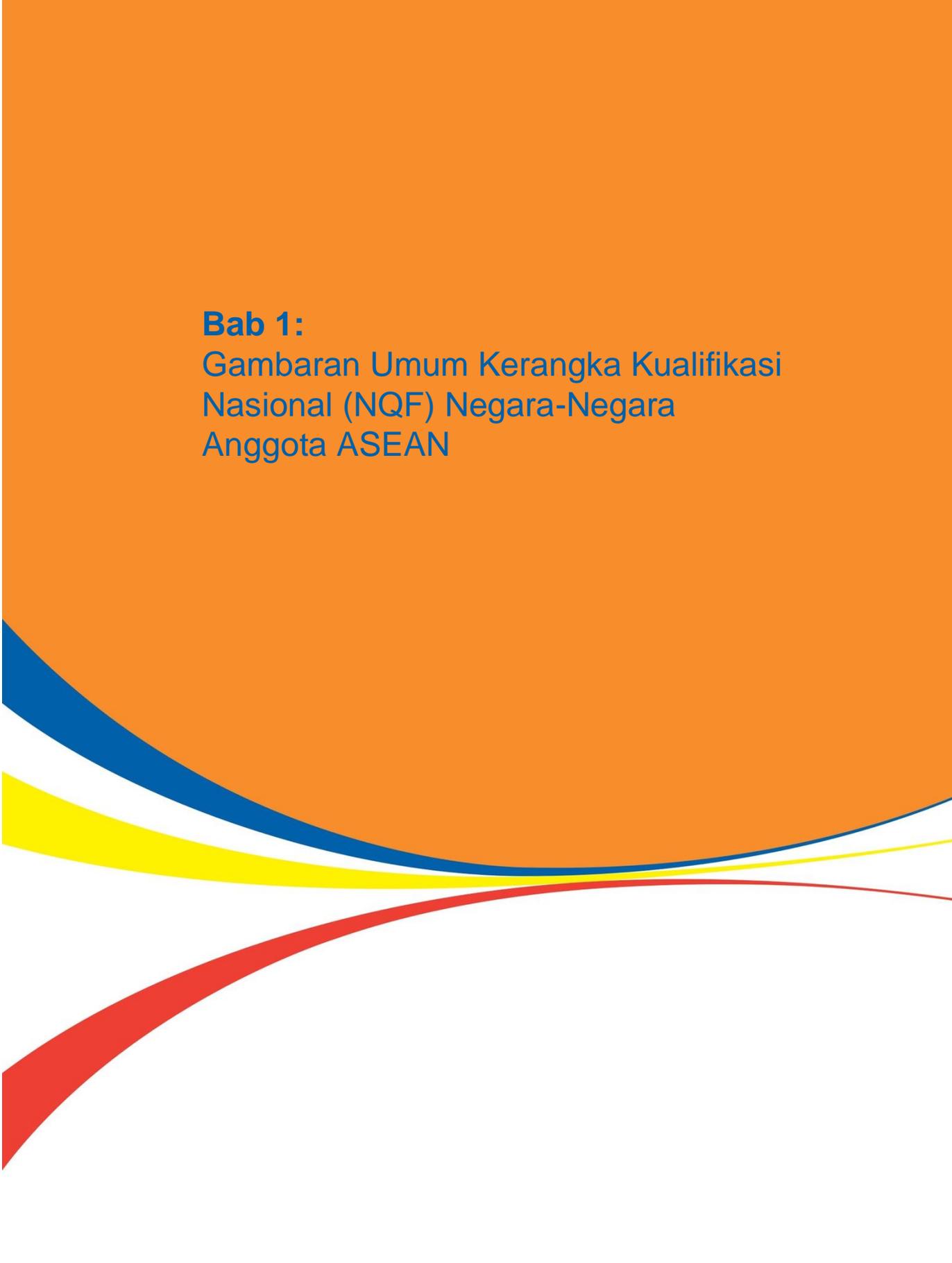
Ketika Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS) menerapkan sistem penjaminan mutu mereka untuk TVET dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dan dengan tingkat pelaksanaan yang berbeda, asumsi tentang jenis organisasi yang bertanggung jawab atas skema sertifikasi kompetensi tidaklah mudah. Definisi berikut ini menguraikan dua istilah kunci yang digunakan dalam panduan plus definisi yang disetujui dari Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN untuk badan penerbit atau pemberi sertifikasi:¹⁷

- **Badan yang kompeten.** Badan yang kompeten secara prinsip bertanggung jawab atas semua atau beberapa aspek sistem sertifikasi kompetensi. Badan yang kompeten dapat berupa badan kualifikasi, yaitu badan yang bertanggung jawab atas pengembangan/dukungan standar pekerjaan, badan penerbit atau badan sertifikasi kompetensi.
- **Penyedia layanan penilaian.** Penyedia adalah mereka yang menyediakan layanan penilaian (dan mungkin layanan pelatihan) dan juga dapat menjadi lembaga penerbit atau badan sertifikasi kompetensi.
- **Badan Penerbit/Pemberi Sertifikasi.** Badan yang menerbitkan kualifikasi (mis., sertifikat, ijazah atau gelar) secara resmi mengakui pencapaian hasil belajar (pengetahuan, keterampilan dan/atau kompetensi) seseorang, yang mengikuti prosedur penilaian dan pengesahan.¹⁸

Panduan ini menggunakan istilah badan yang kompeten dalam preferensi terhadap badan sertifikasi kompetensi sebagaimana dalam beberapa sistem sertifikasi, badan sertifikasi juga dapat menjadi penyedia layanan penilaian dan tidak bertanggung jawab atas penjaminan mutu secara keseluruhan dari sistem atau skema sertifikasi kompetensi.

¹⁷ Dua istilah kunci telah diajukan dari Bab 4 untuk memastikan pemahaman bersama sejak awal panduan. Definisi ketiga adalah istilah AQRF yang disepakati dan diambil dari daftar istilah yang ada dalam panduan ini.

¹⁸ Cedefop (2011), hlm. 10 & 11



Bab 1:
Gambaran Umum Kerangka Kualifikasi
Nasional (NQF) Negara-Negara
Anggota ASEAN

Bab 1: Gambaran Umum Kerangka Kualifikasi Nasional (NQF) Negara-Negara Anggota ASEAN

Cedefop (2011, hlm. 82) mendefinisikan kerangka kualifikasi sebagai:

Instrumen untuk pengembangan dan klasifikasi kualifikasi (mis., di tingkat nasional atau sektoral) sesuai dengan serangkaian kriteria (mis., penggunaan deskriptor) yang berlaku untuk tingkat hasil belajar yang telah ditentukan.

Di seluruh Negara Anggota ASEAN, tidak ada tingkat pengembangan atau pelaksanaan NQF yang seragam. Setiap negara berada pada tahap perencanaan atau pelaksanaan yang berbeda dari QF sektor atau NQF, dan mungkin tidak ada niat sistematis secara eksplisit atau nasional untuk mengembangkan NQF. Pengembangan NQF dapat dikelompokkan berdasarkan kategori umum berikut ini:

1. Tidak ada niat
2. Dikehendaki tetapi tidak ada kemajuan
3. Perencanaan latar belakang sedang berlangsung
4. Pengembangan dan desain awal selesai
5. Beberapa struktur dan proses disepakati dan didokumentasikan
6. Beberapa struktur dan proses ditetapkan dan operasional
7. Struktur dan proses telah dibentuk selama 5 tahun
8. Tinjauan struktur dan proses yang diusulkan atau sedang berlangsung.¹⁹

Tabel di bawah ini menguraikan tingkat pembentukan NQF di wilayah tersebut.

Tabel 1: Rangkuman NQF

Negara	Tingkat pembentukan	Tahap
Brunei Darussalam	Diresmikan tahun 2013, dilaksanakan	6
Kamboja	Dibentuk tahun 2012, tahap awal pelaksanaan	5
Indonesia	Dibentuk tahun 2012, tahap awal pelaksanaan	5
Laos	Direncanakan	3
Malaysia	Dibentuk tahun 2007, sepenuhnya dilaksanakan dan pada	8
Myanmar	Direncanakan	3
Filipina	Dibentuk tahun 2012, tahap awal pelaksanaan	5
Singapura	Sektor QF – Sistem Kualifikasi Keterampilan Tenaga Kerja, Diresmikan tahun 2005	7
Thailand	Dibentuk tahun 2014, tahap awal pelaksanaan, 3 subkerangka yang telah mapan	4
Vietnam	Direncanakan	3

Sumber: Bateman & Coles 2015

Dari QF yang saat ini dikembangkan dan QF yang dalam perencanaan semuanya berbeda dalam hal:

- Pengaturan tata kelola
- Tujuan
- Struktur (tingkat, domain, aplikasi poin kredit).

¹⁹ Kategori-kategori ini digunakan dalam penelitian awal untuk Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN

Di seluruh AMS, QF dibentuk melalui berbagai proses yang dapat mencakup undang-undang atau instrumen legislatif yang secara khusus terkait dengan kerangka atau dengan lembaga yang bertanggung jawab. Di dalam kawasan ASEAN, tiga kerangka terkait langsung dengan lembaga yang bertanggung jawab (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura²⁰); dua kerangka ditetapkan melalui instrumen legislatif yang terkait langsung dengan kerangka tersebut (mis., Kamboja dan Indonesia). Meta kerangka Thailand disetujui oleh Kabinet; di Filipina, kerangka ini didirikan melalui Perintah Eksekutif.

Pengaturan tata kelola QF sering dikaitkan dengan dasar legislatif dari kerangka dan badan yang bertanggung jawab diidentifikasi. Namun, di beberapa negara, seperti Kamboja dan Indonesia, tidak ada batas tanggung jawab yang jelas untuk pengelolaan dan pemantauan NQF di tingkat nasional.

Coles et al. (2014) menunjukkan bahwa fungsi utama Kerangka Kualifikasi Nasional adalah ‘untuk bertindak sebagai tolok ukur untuk tingkat pembelajaran yang diakui dalam sistem kualifikasi nasional’ (hlm. 22). Seluruh kerangka yang didokumentasikan di ASEAN memiliki tujuan yang berbeda-beda; namun, ada beberapa tema umum, seperti pengaturan dan spesifikasi kualifikasi, promosi berbagai jalur untuk pelajar, dan untuk pengakuan internasional.

Tabel di bawah ini menguraikan fitur utama NQF saat ini dan yang diusulkan.

Tabel 2: Rangkuman struktur NQF

Negara	Tingkat	Domain	Berbasis
Brunei Darussalam	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan keterampilan (jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan yang terlibat) • Praktik: Pengetahuan dan Pemahaman Terapan (konteks di mana pengetahuan dan keterampilan diterapkan) • Keterampilan Kognitif Umum • Keterampilan Komunikasi, TIK, dan Berhitung • Otonomi, Akuntabilitas, dan Bekerja dengan orang lain (tingkat independensi) 	<p>H Ed – 40 jam pembelajaran nasional = 1</p> <p>TVET – 10 jam pembelajaran nasional = 1</p>
Kamboja	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan kognitif • Keterampilan psikomotorik • Keterampilan dan tanggung jawab interpersonal • Keterampilan komunikasi, teknologi informasi dan angka 	Bervariasi tergantung pada metodologi
Indonesia	9	<p>Terdiri dari 2 bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum – ciri, kepribadian, sikap kerja, etika dan moralitas • Spesifik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dalam memenuhi pekerjaan dan kompetensi 2. Sains/pengetahuan 3. Metode dan tingkat kompetensi dalam menerapkan sains/pengetahuan 4. Keterampilan manajemen 	Ya – di Pendidikan Tinggi+

²⁰ Sektor pendidikan QF

Laos*	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan • Penerapan • Keterampilan sosial 	-
Malaysia	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan praktis • Keterampilan dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai, sikap dan profesionalisme • Keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan tim • Pemecahan masalah dan keterampilan ilmiah • Manajemen informasi dan keterampilan belajar seumur hidup • Keterampilan manajerial dan kewiraswastaan 	40 jam = 1 poin kredit
Myanmar*	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan keterampilan • Penerapan dan kompetensi • Tanggung jawab 	-
Filipina	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai • Penerapan • Tingkat independensi (otonomi dan tanggung jawab) 	-
Singapura	6	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang terlibat; • Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan • Tingkat akuntabilitas, independensi, organisasi mandiri atau organisasi orang lain yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas • Menyadari tingkat dan jangkauan pekerjaan, dan kedalaman pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan yang terkait dengan kualifikasi 	1 nilai kredit WSQ (cv) setara dengan 10 jam pembelajaran yang disarankan. (RLH), (1 cv = 10 RLH).^
Thailand	9	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan • Atribut 	Ya
Vietnam*	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan • Otonomi dan tanggung jawab 	1 = 30 jam pembelajaran abstrak

Catatan:

* = diusulkan, # = Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2012, + = tidak termasuk dalam keputusan

^Jam Belajar yang Direkomendasikan (RLH) didefinisikan sebagai jumlah jam yang rata-rata diharapkan akan ditempuh oleh seorang peserta pelatihan, guna mencapai hasil belajar yang telah ditentukan dari unit kompetensi, terlepas dari metode pelatihan dan penilaian yang diadopsi.

Sumber: Bateman & Coles 2015.

Sebagian besar kegiatan pengembangan NQF di wilayah ini adalah hasil langsung dari minat dalam penciptaan aliran bebas tenaga kerja terampil melalui "harmonisasi dan standarisasi" (ASEAN 2007, hlm. 18) dan khususnya dalam persiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Seiring dengan perkembangan ini, pengesahan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQR) telah dilaksanakan mulai tahun 2016; hal ini juga telah menciptakan dorongan bagi AMS untuk mengembangkan atau meninjau NQF mereka.

AQR adalah kerangka acuan umum yang berfungsi sebagai perangkat untuk memungkinkan perbandingan kualifikasi di seluruh negara anggota ASEAN. AQR membahas sektor pendidikan dan pelatihan²¹ serta tujuan yang lebih luas untuk mempromosikan pembelajaran seumur hidup.

AQR mengharuskan AMS untuk merujuk sistem kualifikasi mereka pada AQR. Proses pembuatan referensi adalah proses nasional yang otonom di mana para pemangku kepentingan dan otoritas nasional yang relevan menyepakati hubungan antara setiap tingkat kualifikasi nasional dan tingkat dalam AQR. Hubungan antara tingkat kualifikasi nasional dan tingkat AQR ini adalah hasil dari proses pembuatan referensi dan memungkinkan hubungan lebih lanjut, melalui AQR, dengan tingkat kualifikasi di AMS lainnya.

Untuk membangun kepercayaan pada kualifikasi yang diterbitkan di seluruh kawasan, kerangka ini didukung oleh serangkaian prinsip-prinsip penjaminan mutu yang disepakati dan standar-standar luas terkait dengan:

- Fungsi dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menyetujui
- Sistem untuk penilaian pembelajaran dan penerbitan kualifikasi
- Peraturan penerbitan sertifikat.

AQR mengharuskan negara-negara untuk merujuk pada satu atau lebih kerangka penjaminan mutu yang ditetapkan sebagai dasar untuk prinsip-prinsip penjaminan mutu yang disepakati dan standar-standar luas. Kerangka ini akan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi sistem penjaminan mutu untuk sektor pendidikan dan pelatihan yang relevan. Proses pembuatan referensi juga mengharuskan bahwa Negara-Negara Anggota memaparkan sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan mereka.

Pada awal tahun 2016, tidak ada AMS yang telah melakukan proses pembuatan referensi formal walaupun beberapa AMS mungkin telah melakukan pembuatan referensi informal, termasuk menentukan tolok ukur sistem penjaminan mutu mereka.

²¹ Pendidikan dan pelatihan menggabungkan pembelajaran informal, non-formal dan formal. Pembelajaran formal mencakup, tetapi tidak terbatas pada, sekolah wajib, pendidikan orang dewasa dan masyarakat, TVET dan pendidikan tinggi.

Bab 2:

Gambaran Umum Sistem Sertifikasi Kompetensi Negara-Negara Anggota ASEAN

Bab 2: Gambaran Umum Sistem Sertifikasi Kompetensi Negara-Negara Anggota ASEAN

Cedefop (2011, hlm. 16) mendefinisikan sertifikasi sebagai “proses penerbitan sertifikat, ijazah atau gelar dari hasil belajar secara formal yang membuktikan bahwa serangkaian hasil belajar (pengetahuan, keahlian, keterampilan dan/atau kompetensi) yang diperoleh oleh seseorang telah dinilai dan disahkan oleh badan yang kompeten terhadap standar yang telah ditentukan”.

Salah satu jenis sistem sertifikasi yang paling umum terkait dengan pengembangan sumber daya manusia adalah ketika seseorang disertifikasi karena telah mampu melakukan tugas kerja tertentu yang terkait dengan pekerjaan. Sertifikasi umumnya didasarkan pada penilaian, yang umumnya mencakup tes, penilaian kinerja dan/atau portofolio. Sertifikasi dapat mencakup bukti pengalaman di tempat kerja sebelum penilaian. Beberapa sistem sertifikasi mencakup periode pengakuan yang valid dan karenanya memerlukan sertifikasi ulang, sedangkan sistem lain menyertifikasi seumur hidup setelah menyelesaikan semua persyaratan sertifikasi. Sertifikasi tidak selalu mengacu pada kemampuan hukum untuk melakukan praktik dalam profesi tertentu; hal ini biasanya disebut perizinan. Biasanya perizinan didasarkan pada instrumen legislatif yang merupakan persyaratan pemerintah, melibatkan perlindungan keselamatan publik, dan dikelola oleh badan pengawas.

Dalam beberapa kasus, sistem sertifikasi kompetensi berada di luar jangkauan NQF atau sistem kualifikasi formal tanpa memandang apakah hal itu telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh badan profesional atau oleh perusahaan. Mungkin ada lebih dari satu jenis sistem sertifikasi kompetensi (yaitu pemerintah, badan profesional, perusahaan swasta) yang didirikan di dalam negara. Dalam beberapa kasus, sistem sertifikasi kompetensi mungkin tidak menghasilkan penerbitan kualifikasi atau hasil pekerjaan, yaitu, sistem tersebut terbatas pada pernyataan kompetensi yang dicapai.

Panduan ini berkaitan secara khusus dengan sistem sertifikasi kompetensi yang telah dikembangkan melalui instrumen legislatif seperti undang-undang, keputusan, atau peraturan, dan dikelola oleh lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah semi otonom. Sistem sertifikasi kompetensi yang terkait dengan badan profesional atau perusahaan swasta dapat menggunakan panduan ini untuk menginformasikan praktiknya.

Gambaran umum sistem sertifikasi kompetensi

Sistem sertifikasi kompetensi di seluruh AMS difokuskan pada pengembangan dan perolehan kompetensi. Sistem sertifikasi kompetensi di seluruh kawasan umumnya berfokus pada tingkat keterampilan yang lebih rendah hingga menengah, tetapi mungkin juga terkait dengan tingkat atau pekerjaan yang lebih tinggi, misalnya, kerangka kualifikasi profesional di Thailand.

Di seluruh AMS, dinyatakan bahwa sistem sertifikasi kompetensi umumnya berada di bawah kewenangan kementerian yang bertanggung jawab untuk pengembangan tenaga kerja. Namun, contoh yang lebih baru adalah sistem sertifikasi kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh entitas dengan beberapa tingkat independensi, misalnya, Lembaga Kualifikasi Profesional Thailand (*Thailand Professional Qualification Institute/TPQI*) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia.

Penyelarasan sistem sertifikasi kompetensi dengan sistem kualifikasi

Dalam banyak kasus, sistem sertifikasi kompetensi telah mendahului pengembangan dan peresmian NQF. Dalam beberapa kasus, hal ini telah menyebabkan ketegangan antara sistem yang telah mendokumentasikan tingkat kompetensi dan deskriptor tingkat yang diusulkan dari NQF. Menemukan titik temu atau menyelaraskan kedua kerangka sering kali merupakan penghalang utama untuk kesepakatan dan pelaksanaan NQF.

NQF yang lebih baru sering berfokus pada pengintegrasian sistem sertifikasi kompetensi yang ada dalam NQF. NQF yang menyediakan struktur metakerangka bukanlah hal baru. Di Afrika Selatan, ada satu lembaga yang bertanggung jawab untuk NQF. Untuk masing-masing dari tiga sektor pendidikan dan pelatihan, terdapat tiga subkerangka yang dikelola oleh Dewan Mutu mereka sendiri yang juga bertanggung jawab untuk penjaminan mutu. Pendekatan serupa telah diambil oleh Thailand, yang telah membentuk metakerangka untuk menghubungkan kerangka yang ada dan sistem yang berbeda. Tabel di bawah ini menguraikan penyelarasan.

Tabel 3: Kerangka Kualifikasi Nasional Thailand

Kualifikasi Pendidikan			Tingkat NQF	Standar	
Dasar	TVET	Lebih		TPQI	DSD
		S3	9		
		S2 +Sert.	8		
		S2	7	7	
		S1 +Sert.	6	6	
	S1	S1	5	5	3*
	D3 (Dip.)	D4 (Asso.)	4	4	2
	D1/D2 (Sert.)		3	3	1
SMP (<i>Up. Sec.</i>)			2	2	
SMA (<i>Low. Sec.</i>)			1	1	

Sumber: Naskah ikhtisar negara Thailand 2014.

***Catatan:**

Rapat Satuan Tugas *Ad-Hoc* yang dikonfirmasi (Februari 2016). Perwakilan Thailand mengindikasikan bahwa ada 4 tingkat tetapi hanya 3 tingkat yang telah dilaksanakan sepenuhnya.

Tingkat-tingkat sertifikasi

Di beberapa negara, sistem sertifikasi kompetensi telah menetapkan tingkat kompetensi dan deskriptor tingkat yang dikembangkan. Dalam beberapa kasus, hal ini adalah **perintis jalan NQF** atau bersifat terpisah dari NQF. Tabel di bawah ini menguraikan lima contoh AMS tingkat kompetensi yang tertanam dalam sistem sertifikasi kompetensi.

Tabel 4: Tingkat keterampilan

Negara	Tingkat keterampilan
Laos	4 (+dasar)
Malaysia	5
Myanmar	4
Filipina	5
Thailand	
• Keterampilan	4*
• Profesional	7
Vietnam	5

Sumber: Rapat Satuan Tugas Ad-Hoc yang dikonfirmasi Februari 2015.

Catatan:

* terdapat 4 tingkat tetapi hanya 3 tingkat yang telah dilaksanakan sepenuhnya.

Deskriptor sistem sertifikasi kompetensi dari tingkat keterampilan dan pengetahuan juga bervariasi di berbagai negara. Ketika NQF semakin tertanam dalam AMS, mungkin deskriptor tingkat ini dimasukkan atau digolongkan dalam deskriptor tingkat NQF.

Sampel berikut dari Vietnam ini menguraikan deskriptor lima tingkat dan hubungannya dengan sertifikat nasional.

Tabel 5: Tingkat kualifikasi keterampilan nasional Vietnam

Tingkat kualifikasi keterampilan nasional		
Tingkat	Persyaratan	Sertifikasi
Tingkat 1	<ul style="list-style-type: none"> a) Kompeten dalam melakukan tugas-tugas sederhana dan tugas berulang dalam satu pekerjaan b) Memahami dan memiliki pengetahuan dasar dalam berbagai operasi pekerjaan dari beberapa bidang; dapat menerapkan beberapa pengetahuan khusus saat menjalankan tugas. c) Dapat menerima, mencatat, dan mentransfer informasi sesuai kebutuhan, memikul tanggung jawab terbatas untuk hasil, keluaran diri. 	Sertifikat 1
Tingkat 2	<ul style="list-style-type: none"> a) Kompeten dalam melakukan tugas-tugas sederhana, tugas berulang dan beberapa tugas rumit dalam berbagai situasi yang telah ditentukan di bawah bimbingan. b) Memahami dan memiliki beberapa pengetahuan dasar tentang operasi suatu pekerjaan; dapat menerapkan beberapa pengetahuan profesional serta dapat menghasilkan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah normal dalam pekerjaannya. c) Mampu mempertimbangkan, memprediksi, dan menjelaskan informasi; dapat bekerja dalam tim, dapat bekerja secara mandiri dalam beberapa kasus serta mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk hasil, keluaran diri. 	Sertifikat 2

Tingkat 3	<p>a) Kompeten dalam melakukan tugas-tugas yang berbeda, yang sebagian besar bersifat kompleks dan utama dalam berbagai opsi, dapat bekerja secara mandiri tanpa bimbingan.</p> <p>b) Memahami dan memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep teoretis dasar, pengetahuan profesional tentang pekerjaan; dapat menerapkan pengetahuan profesional dan dapat mengidentifikasi untuk menerapkan pengetahuan guna menangani, memecahkan masalah normal dalam berbagai konteks.</p> <p>c) Dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber; dapat memberikan arahan bagi orang lain dalam tim atau kelompok kerja; bertanggung jawab atas keluaran diri dengan standar mutu yang telah ditentukan dan dapat mengambil tanggung jawab terbatas untuk keluaran orang lain dalam tim atau kelompok kerja.</p>	Sertifikat 3
Tingkat 4	<p>a) Kompeten dalam melakukan berbagai tugas yang bervariasi, yang sebagian besar bersifat kompleks dan utama dalam berbagai opsi yang berbeda, dapat bekerja secara mandiri tanpa pengawasan dan bimbingan.</p> <p>b) Memahami dan memiliki pengetahuan luas tentang konsep-konsep teoretis dasar dan memiliki pengetahuan profesional yang mendalam dalam berbagai bidang pekerjaan; dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan kreatif untuk menangani masalah teknis yang kompleks dalam berbagai konteks.</p> <p>c) Dapat menganalisis, mengevaluasi informasi, dan dapat menggunakan analisis untuk menghasilkan gagasan, rekomendasi yang didedikasikan untuk penelitian dan manajemen; dapat mengelola dan menjalankan tim atau kelompok kerja saat melakukan pekerjaan; bertanggung jawab atas hasil, keluaran diri dengan standar mutu yang telah ditentukan dan tanggung jawab terbatas untuk hasil, keluaran dari tim kerja atau kelompok.</p>	Sertifikat 4
Tingkat 5	<p>a) Kompeten dalam melakukan berbagai tugas pekerjaan dengan lancar dan terampil; bekerja dengan kemandirian yang tinggi, kontrol diri yang baik.</p> <p>b) Memiliki pengetahuan luas tentang konsep-konsep teoretis dasar dan memiliki pengetahuan profesional yang mendalam dalam banyak bidang pekerjaan; memiliki teknik untuk menganalisis, memperkirakan, merancang, mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah teknis dan manajemen dalam cakupan yang luas.</p> <p>c) Dapat menganalisis, mengevaluasi, dan menggeneralisasi informasi untuk menghasilkan pendapat dan inisiatif; mengelola dan menjalankan tim atau kelompok kerja saat melakukan pekerjaan; bertanggung jawab atas hasil, keluaran diri dengan mutu standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab atas hasil kerja tim atau kelompok sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan.</p>	Sertifikat 5

Sumber: Standar Keterampilan Nasional, Departemen Umum Pelatihan Kejuruan, Kementerian Ketenagakerjaan, Invalids dan Urusan Sosial.

Definisi kompetensi

Penelitian terbaru (naskah Grup Bank Dunia 2015) menunjukkan bahwa banyak definisi dari kompetensi ada dalam literatur kejuruan dan pendidikan dan bahwa sering kali pendekatan yang diambil untuk kompetensi memengaruhi bagaimana kompetensi didokumentasikan dan dinilai. Temuan ini mencerminkan berbagai definisi yang ada di seluruh AMS. Tabel di bawah ini merangkum definisi kompetensi dari masing-masing negara.

Tabel 6: Definisi kompetensi

Negara	Definisi
Kamboja	Standar keterampilan 'dibutuhkan untuk kinerja yang efektif di tempat kerja. Standar ini melampaui penetapan pengetahuan, keterampilan, dan persyaratan sikap ke dalam penentuan tingkat kinerja yang harus dicapai oleh pekerja dalam pekerjaan tertentu'.
Indonesia	Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk diterapkan di tempat kerja.
Laos	Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dan diterapkan pada standar kinerja yang diharapkan di tempat kerja. Kompetensi menggambarkan tugas-tugas pekerjaan dalam peran pekerjaan tertentu.
Malaysia	Kompetensi dicatat sebagai kemampuan yang diperoleh dan dipraktikkan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara kompeten.
Myanmar	Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.
Filipina	Kompetensi diketahui sebagai 'kemampuan atau kecakapan, dan mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan kerja dalam berbagai konteks dan lingkungan dengan standar yang diharapkan di tempat kerja' (TESDA).
Singapura	Kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur yang mendorong kinerja seseorang untuk melakukan pekerjaannya secara efektif.
Thailand	Sektor kejuruan dan keterampilan: Kompetensi adalah tingkat mutu proses atau produk yang diharapkan atau diterima dari seseorang yang melakukan presentasi, dan/atau menyelesaikan masalah, secara praktis menunjukkan kapasitasnya setelah pembelajaran/pengalaman kerja'.
	Sektor keterampilan profesional: Kompetensi adalah aplikasi pengetahuan dan pengalaman untuk bekerja.
Vietnam	Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang esensial terhadap kinerja tugas-tugas dari satu pekerjaan.

Sumber: Diadaptasi dari naskah Grup Bank Dunia 2015.

Baru-baru ini AMS telah melakukan konfirmasi melalui AQRF bahwa istilah regional yang disepakati didefinisikan sebagai:

Kompetensi adalah kemampuan yang melampaui penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi meliputi:

- i) kompetensi kognitif yang melibatkan penggunaan teori dan konsep, serta pengetahuan implisit informal yang diperoleh melalui pengalaman*
- ii) kompetensi fungsional (keterampilan atau keahlian), hal-hal yang harus dapat dilakukan seseorang ketika mereka bekerja dalam bidang tertentu*

iii) kompetensi pribadi yang melibatkan pengetahuan tentang cara memosisikan diri dalam situasi tertentu, dan

iv) kompetensi etis yang melibatkan penguasaan nilai pribadi dan profesional tertentu.²²

Perjanjian ini tidak berarti bahwa AMS perlu mengubah definisi negara mereka sendiri, tetapi dalam dialog dan inisiatif regional definisi ini berlaku.

*Penjaminan mutu sertifikasi*²³

Di seluruh wilayah, setiap AMS melakukan proses penjaminan mutu utama berikut ini dengan berbagai cara:

1. Pengembangan standar kompetensi
2. Kompetensi penilai
3. Kemampuan penyedia
4. Penilaian
5. Keyakinan dalam keputusan penilaian.

1. Pengembangan dan format standar kompetensi

Sebagian besar AMS mengembangkan standar kompetensi atau pekerjaan dalam sektor TVET; walaupun, dalam banyak kasus, negara-negara menggunakan istilah standar kompetensi dan standar pekerjaan secara bergantian. Proses pengembangan standar kompetensi di sebagian besar AMS mengikuti proses serupa. Negara-negara mendokumentasikan proses baik dalam arahan ataupun panduan formal, dan dalam semua kasus, entitas pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan standar kompetensi. Semua AMS menggunakan perwakilan industri sektor swasta dalam beberapa bentuk (mis., kelompok kerja teknis, pertemuan pengesahan sektor industri, kelompok pengusaha, kelompok pekerja) dan sering menggunakan pelatih atau organisasi pelatihan. Proses untuk pengembangan mencakup bauran DACUM, dan analisis fungsional serta analisis tugas kerja ditambah penelitian internasional dan ketergantungan pada program pelatihan yang ada. Pengesahan akhir umumnya dikonfirmasi oleh badan pemerintah yang ditugaskan, tetapi dalam beberapa kasus pengesahan akhir dikonfirmasi oleh komite yang mencakup perwakilan sektor industri (mis., Laos).²⁴

Secara umum, format standar di sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan yang lebih luas mengikuti format yang serupa. Secara umum, sebagian besar negara-negara ASEAN cenderung menyelaraskan format kompetensi atau standar pekerjaan mereka dengan standar kompetensi model regional ILO.²⁵ Format standar kompetensi umumnya meliputi:

- Informasi latar belakang pekerjaan
- Kode dan judul unit
- Deskriptor unit
- Unit Kompetensi
 - o Elemen dan kriteria kinerja
 - o pernyataan Variabel dan Jangkauan
 - o Panduan bukti

²² Coles & Werquin (2006), hlm. 23.

²³ Informasi dalam bagian ini didasarkan pada penelitian Grup Bank Dunia yang belum dipublikasikan baru-baru ini (naskah 2015).

²⁴ naskah Grup Bank Dunia 2015

²⁵ Panduan yang diperbarui untuk pengembangan Standar Kompetensi Model Regional, 2016

Di sebagian besar negara-negara ASEAN, standar dibagi menjadi inti dan pilihan, yang mencakup kompetensi teknis dan kompetensi umum.

Dalam skema sertifikasi kompetensi,²⁶ hasilnya mungkin atau mungkin tidak menghasilkan kualifikasi. Namun, dalam kedua kasus tersebut, kelompok kompetensi atau standar pekerjaan dikelompokkan ke dalam peran atau kualifikasi pekerjaan. Negara menggunakan berbagai istilah untuk gugus standar dan aturan penyelesaian ini yang sering kali didukung oleh informasi tambahan, seperti:

- Kerangka kompetensi (Brunei Darussalam)
- Peraturan pelatihan (Filipina)
- Kerangka Kualifikasi Keterampilan Tenaga Kerja (WSQ) (Singapura)

2. Penilai

Walaupun sistem sertifikasi kompetensi dapat mencakup pelatihan dan penilaian, beberapa sistem hanya merupakan sistem penilaian saja. Persyaratan untuk para penilai di seluruh AMS umumnya diungkapkan dalam standar mutu (mis., Singapura dan Indonesia) atau kebijakan dan panduan (mis., Filipina, Malaysia). Walaupun persyaratan khusus dapat berbeda dalam perinciannya, umumnya persyaratan minimum diperlakukan bagi para pelatih dan/atau penilai untuk memiliki setidaknya tingkat kompetensi dalam isi dan keterampilan kejuruan serta kualifikasi dalam pengajaran pedagogi dan, dalam beberapa kasus, pengalaman di tempat kerja. Dalam beberapa kasus, para penilai membutuhkan serangkaian kompetensi spesifik yang terkait dengan penilaian berbasis kompetensi. Di beberapa negara, persyaratan para pelatih/penilai bersifat relatif baru dan belum sepenuhnya diterapkan.

Di beberapa negara ada daftar nasional untuk pelatih (Filipina menjadi contoh dari daftar TVET nasional, dan juga di Thailand [OVEC]), dan di mana penilaian dikendalikan secara terpusat ada daftar para penilai yang memenuhi syarat (mis., TVET Filipina dan sistem sertifikasi kompetensi Indonesia). Baik di Filipina maupun dalam sistem sertifikasi kompetensi Indonesia, terdapat proses pemantauan untuk para penilai.

3. Kemampuan penyedia

Di seluruh AMS, penjaminan mutu penyedia²⁷ umumnya terletak pada satu atau dua kementerian, misalnya, kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan atau tenaga kerja. Pengaturan penjaminan mutu dapat bervariasi dan tidak harus diterapkan secara konsisten di semua jenis penyedia TVET. Proses persetujuan dapat:

- Tidak wajib untuk kelompok penyedia spesifik, tetapi mungkin diperlukan oleh kelompok penyedia tertentu dengan kelompok sasaran tertentu
- Diambil alih untuk penyedia tertentu, misalnya, penyedia pemerintah
- Wajib bagi semua penyedia untuk memberikan kualifikasi yang diakui di bawah NQF

Dalam sebagian besar AMS, persyaratan untuk persetujuan penyedia didokumentasikan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dalam beberapa kasus dalam standar mutu.

Tingkat pelaksanaan dari penyedia pemantauan dan hasil penyedia mungkin tidak ditetapkan dengan baik di seluruh sistem sertifikasi kompetensi AMS. Tidak semua lembaga penanggung jawab AMS memiliki daftar penyedia publik yang disertai dengan kualifikasi **yang disetujui untuk disampaikan atau dinilai**.

²⁶ Skema sertifikasi adalah kompetensi dan persyaratan lain yang terkait dengan kategori pekerjaan tertentu. Skema sertifikasi dapat menghasilkan sertifikat yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah memenuhi persyaratan, atau dimasukkan dalam kualifikasi.

²⁷ Penyedia pelatihan, penyedia pelatihan dan penilaian, hanya penyedia penilaian

4. Penilaian

Kompetensi dapat diperoleh melalui:

- Pelatihan
- Pengalaman kerja
- Pengalaman hidup

Penilaian digunakan untuk mengonfirmasi kompetensi. Penilaian dapat terjadi dalam penyedia pelatihan dan penilaian atau dengan penyedia penilaian saja. Di beberapa AMS, pemisahan ketentuan pelatihan dari ketentuan penilaian dianggap sebagai elemen penting untuk sistem sertifikasi kompetensi yang kuat. Pendekatan ini sebagian dikarenakan beberapa badan sertifikasi mengikuti *ISO/EC 17024:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi perseorangan*. Standar ini menekankan perlunya ketidakberpihakan dari kegiatan sertifikasi; memisahkan pelatihan dari penilaian dianggap sebagai peragaan persyaratan ini.

Di seluruh AMS, layanan penilaian saja umumnya tidak dipandang sebagai pengakuan atas penilaian pembelajaran sebelumnya, walaupun secara teknis layanan tersebut adalah satu dan sama. Keduanya melibatkan penilaian kompetensi seseorang tanpa penilai yang terlibat dalam pembelajaran seseorang (terlepas dari apakah pembelajaran itu dicapai melalui cara formal, non-formal atau informal).

5. Mempromosikan keyakinan dalam keputusan penilaian

Secara umum diterima bahwa keputusan penilaian harus valid dan dapat diandalkan.

Secara umum, validitas berkaitan dengan kesesuaian inferensi, penggunaan dan konsekuensi yang dihasilkan dari penilaian. Dalam istilah sederhana, hal ini berkaitan dengan sejauh mana keputusan penilaian tentang seorang kandidat (mis., kompeten/belum kompeten, nilai dan/atau skor), yang berdasarkan pada bukti kinerja oleh kandidat, dibenarkan.

Secara umum, keandalan adalah perkiraan seberapa akurat atau presisi tugas tersebut sebagai instrumen pengukuran. Keandalan berkaitan dengan berapa banyak kesalahan yang disertakan dalam bukti.

Sumber: Gillis & Bateman 2015, hlm. 26

Di seluruh AMS, cara mempromosikan keyakinan terhadap keputusan penilaian bervariasi dalam hal pendekatan dan tingkat pelaksanaan. Strategi-strategi meliputi:

- Pengesahan instrumen atau alat penilaian (mis., Departemen Pengembangan Keterampilan di Malaysia)
- Audit dan penggunaan verifikasi eksternal (mis., Badan Nasional Sertifikasi Profesi [BNSP] di Indonesia)
- Pengesahan dan pemantauan para penilai (mis., Otoritas Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan Teknis [TESDA] di Filipina)
- Penggunaan perwakilan industri atau perusahaan dalam penilaian atau dalam peninjauan pascapenilaian

Dalam banyak kasus, penjaminan mutu dari keputusan penilaian adalah salah satu tantangan terbesar untuk skema sertifikasi kompetensi AMS.

Inisiatif internasional atau regional

Bagi banyak AMS, tekanan tenaga kerja dan mobilitas pelajar telah menekankan perlunya pengakuan kualifikasi internasional, termasuk memfasilitasi pengakuan warga negara mereka sendiri di negara lain.

Strategi yang dapat memfasilitasi pengakuan meliputi:

- Pengembangan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQRF) baru-baru ini telah menekankan NQF dan potensi manfaat yang dihasilkan dari pembuatan referensi. Namun, bagi banyak AMS, hal ini adalah masa awal untuk merujuk NQF mereka pada NQF negara lain atau pada AQRF.²⁸
- AMS telah fokus pada perjanjian saling pengakuan (mis., teknik dan keperawatan, arsitektur, survei, praktik dokter medis, praktik dokter gigi, akuntansi, dan tenaga profesional pariwisata).
- Masing-masing negara telah mencapai kesepakatan dengan negara lain tentang referensi atau MOU yang dinegosiasikan.
- Dalam hal seseorang yang masuk dan menginginkan penilaian kualifikasi, tidak semua negara memiliki proses yang terdokumentasi untuk kasus-kasus ini, dan dalam banyak kasus telah dilakukan berdasarkan kasus per kasus.

Selain itu, ada sejumlah inisiatif regional yang bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan terhadap seseorang dan/atau sistem:

- Konvensi Regional Asia-Pasifik tentang Pengakuan Kualifikasi dalam Pendidikan Tinggi 2011 (UNESCO 2012) bertujuan untuk "memastikan bahwa studi, ijazah, dan gelar dalam pendidikan tinggi diakui seluas mungkin, dengan mempertimbangkan keragaman sistem pendidikan di wilayah Asia-Pasifik dan kekayaan latar belakang budaya, sosial, politik, agama, dan ekonominya".²⁹ Konvensi ini berkaitan dengan pendidikan tinggi yang didefinisikan sebagai 'pendidikan pascasekolah menengah, pelatihan atau penelitian yang diakui oleh otoritas terkait dari suatu pihak sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi'.³⁰ Konvensi ini dapat mencakup TVET dan pendidikan tinggi (atau program tingkat universitas) tergantung pada pendekatan masing-masing negara untuk melaksanakan Konvensi ini. Konvensi ini berfokus pada penetapan prinsip-prinsip dasar untuk penyediaan informasi dan pelaksanaan konvensi. Pasal III menguraikan proses penilaian dan pengakuan kualifikasi.³¹
- Kemitraan Trans-Pasifik yang bertujuan untuk: membuat perjanjian regional yang mempromosikan integrasi ekonomi; membawa pertumbuhan ekonomi dan manfaat sosial; menciptakan peluang baru bagi pekerja dan bisnis; berkontribusi pada peningkatan standar hidup; menguntungkan konsumen; mengurangi kemiskinan; dan, mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan.³²

²⁸ Lihat Bagian 6 Panduan ini untuk perincian lebih lanjut

²⁹ <http://www.unescobkk.org/education/higher-education/promotion-of-academic-mobility/asia-pacific-regional-convention-on-the-recognition-of-qualifications-in-higher-education-an-overview/>

³⁰ UNESCO 2012, hlm. 3

³¹ UNESCO 2012

³² Negara-negara ASEAN yang menjadi bagian dari perjanjian ini meliputi: Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Vietnam; <http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/official-documents/Documents/preamble.pdf>

Bab 3:

Aspek-Aspek Kunci Penjaminan Mutu



Bab 3: Aspek-Aspek Kunci Penjaminan Mutu

Proses sertifikasi mencakup penerbitan sertifikat, ijazah, atau daftar hasil belajar yang membuktikan bahwa kandidat telah dinilai dan divalidasi oleh badan yang kompeten terhadap standar yang telah ditentukan sebelumnya. Asumsi dalam proses ini yaitu bahwa seorang kandidat telah melakukan pembelajaran, baik melalui pembelajaran formal ataupun melalui konteks yang kurang formal seperti pekerjaan atau kegiatan pribadi. Hal yang penting untuk definisi ini adalah:

- Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang yang lebih luas telah dinilai berdasarkan kriteria seperti hasil belajar atau standar kompetensi
- Sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kepercayaan publik dan kompetensi, dan
- Sertifikat ini diakui dan dipercaya oleh pihak lain di pasar tenaga kerja dan/atau sektor pendidikan dan pelatihan lebih lanjut

Dasar kepercayaan dengan penghargaan yang dikeluarkan terletak pada pengaturan penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan yang kompeten.

Prinsip penjaminan mutu

Sistem penjaminan mutu mungkin memiliki prinsip eksplisit atau implisit yang menginformasikan proses yang digunakan oleh pembuat kebijakan dan/atau badan yang kompeten.

Kerangka Penjaminan Mutu EAS TVET (EAS TVET QAF, 2012) menunjukkan bahwa pertimbangan prinsip-prinsip untuk penjaminan mutu sistem TVET harus mencerminkan prinsip-prinsip berikut:

- *Transparansi dan akuntabilitas:*
Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama dari tata kelola yang baik. Akuntabilitas mengacu pada persyaratan hukum dan pelaporan sedangkan transparansi terkait dengan pelaporan publik atas proses dan kinerja yang tepat waktu, andal, jelas dan relevan.
- *Komparabilitas:*
Komparabilitas mengacu pada pengakuan bahwa langkah-langkah penjaminan mutu dapat bervariasi di berbagai negara dan secara internal dengan sistem suatu negara. Namun, langkah-langkah ini perlu didasarkan pada standar dan harapan pembandingan.
- *Fleksibilitas dan daya tanggap:*
Fleksibilitas dan daya tanggap mengacu pada langkah-langkah penjaminan mutu yang cukup fleksibel untuk mendorong inovasi dan fleksibilitas penyediaan, dan tidak dibangun hanya berdasarkan model kepatuhan atau hukuman.
- *Keseimbangan dan integrasi:*
Keseimbangan dan integrasi mengacu pada sistem penjaminan mutu yang menyeimbangkan standar yang ditetapkan dan perlindungan kepentingan dari para pemangku kepentingan, dengan mendorong perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan.
- *Kontinuitas dan konsistensi:*
Kontinuitas dan konsistensi mengacu pada penyediaan kontinuitas untuk menjaga kepercayaan diri para pemangku kepentingan dan mampu konsisten dalam penerapannya.
- *Standar minimum:*
Standar ini mengacu pada sistem TVET dengan menggunakan standar yang ditetapkan untuk masukan dan keluaran.

- *Penjaminan dan perbaikan:*
Penjaminan dan perbaikan mengacu pada sistem mutu yang memberikan penjaminan standar dan mendorong perbaikan dalam penyampaian dan hasil.
- *Independensi*
Tata kelola yang baik juga mencakup independensi keputusan dan tindakan serta menghindari konflik kepentingan.
- *Subsidiaritas:*
Subsidiaritas mengacu pada kegiatan penjaminan mutu dan penilaian yang dilakukan dekat dengan pengiriman TVET.

Namun, setiap AMS bertanggung jawab untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar pendukung yang akan menginformasikan penjaminan mutu dari sistem sertifikasi kompetensi mereka. Menjabarkan prinsip-prinsip dalam pernyataan visi dan misi untuk badan-badan yang kompeten, membuat pernyataan dan keputusan kebijakan publik, dan memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan utama dalam arah kebijakan akan membantu dalam mengumumkan dan mengomunikasikan Prinsip-prinsip ini.

Elemen-elemen penjaminan mutu

Negara-negara memiliki pengalaman dan pendekatan yang berbeda untuk penjaminan mutu. Namun, EAS TVET QAF (2012) mencatat bahwa unsur-unsur untuk penjaminan mutu TVET umumnya meliputi:

1. Produk TVET melalui persetujuan standar (seperti standar pendidikan dan/atau kompetensi serta untuk sertifikasi kualifikasi).
2. Pelatihan dan/atau penyedia penilaian melalui proses persetujuan³³ berdasarkan infrastruktur penyedia, kejujuran keuangan, kualifikasi dan pengalaman staf, sistem manajemen, sistem pengiriman dan penilaian, dan sistem dukungan pelajar.
3. TVET memproses melalui audit proses dan hasil penyedia, termasuk pembelajaran pelajar dan hasil kerja serta tingkat kepuasan pelajar dan pengguna.
4. Hasil TVET melalui kontrol, pengawasan atau pemantauan penilaian serta prosedur dan hasil kelulusan.
5. Evaluasi penyedia atau seluruh sistem mutu TVET, termasuk evaluasi oleh lembaga eksternal.
6. Penyediaan informasi publik tentang kinerja penyedia, seperti penyelesaian program dan unit, kepuasan pelajar dan pengusaha.

Tidak selalu demikian bahwa semua aspek ini menjadi tanggung jawab satu badan yang kompeten di suatu negara; namun, sebagian besar fungsi yang tercantum di atas akan menjadi tanggung jawab masing-masing badan yang kompeten. Badan kompeten yang relevan untuk berbagai elemen harus dapat menunjukkan bahwa terdapat:

- Pengaturan tata kelola yang kuat. Tata kelola dapat didefinisikan sebagai: "... serangkaian tanggung jawab dan praktik, kebijakan dan prosedur, yang dilaksanakan oleh eksekutif lembaga, untuk memberikan arahan strategis, memastikan tercapainya tujuan, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dan dengan akuntabilitas".³⁴
- Sistem manajemen mutu yang berlaku untuk semua fungsinya, misalnya, persetujuan kualifikasi atau skema sertifikasi kompetensi, persetujuan penyedia penilaian.
- Sarana untuk mengatasi keluhan pemangku kepentingan.

³³ Di beberapa daerah, proses pengesahan kejuruan, kapasitas dan proses penyedia pelatihan disebut sebagai 'pencatatan' atau 'akreditasi'.

Proses persetujuan ini juga mengambil alih gagasan peninjauan dan persetujuan yang sedang berlangsung.

³⁴ Pemerintah Australia 2007, hlm. 1.

Badan yang kompeten dalam AMS perlu mempertimbangkan bagaimana sistem penjaminan mutu mereka menunjukkan enam elemen yang tercantum di atas, atau bagaimana elemen-elemen ini dimasukkan ke dalam sistem penjaminan mutu yang baru dikembangkan atau dirancang ulang untuk TVET atau sistem sertifikasi kompetensi.

1. Pengembangan produk TVET

Dalam sistem TVET apa pun, ada beberapa opsi untuk pembuatan standar pencapaian TVET, meliputi:

- Standar kompetensi adalah pernyataan pengetahuan, keterampilan dan/atau kompetensi yang terkait dengan suatu pekerjaan.
- Standar pekerjaan adalah pernyataan kegiatan dan tugas yang terkait dengan pekerjaan tertentu dan praktiknya.
- Standar penilaian adalah pernyataan hasil belajar untuk dinilai dan metodologi untuk digunakan.
- Standar sertifikasi adalah aturan untuk mendapatkan penghargaan dan hak yang diberikan.
- Standar pendidikan yang merupakan pernyataan tujuan pembelajaran, isi yang harus dibahas, persyaratan masuk dan sumber daya yang diperlukan

Sistem TVET suatu negara dapat menggunakan bauran dari standar-standar ini atau fokus pada satu atau dua, misalnya, standar kompetensi atau pekerjaan. Pengembang standar ini mungkin bertanggung jawab atas serangkaian standar tunggal atau ganda dan mencakup:

- Penyedia publik
- Lembaga tunggal atau banyak lembaga
- Berbagai perusahaan atau lembaga industri

Untuk badan-badan kompeten yang mematuhi *ISO/IEC 17024:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi atau perseorangan*, standar sertifikasi disebut "skema sertifikasi". Di bawah Standar ISO ini, skema sertifikasi mencakup lingkup sertifikasi, deskripsi pekerjaan dan tugas, kompetensi yang diperlukan, dan prasyarat. Selain itu, Standar ISO ini mensyaratkan pengembangan skema sertifikasi untuk menyertakan tenaga ahli yang tepat, prasyarat, analisis pekerjaan, panduan penilaian dan isi pemeriksaan, dan persyaratan sertifikasi ulang. Persyaratan akhir ini adalah perbedaan intrinsik antara sistem kualifikasi dan sistem sertifikasi kompetensi yang mengikuti *ISO/IEC 17024:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi atau perseorangan*. Untuk penganut ISO, ada persyaratan untuk sertifikasi ulang, sedangkan persyaratan ini sering menjadi tanggung jawab badan lisensi dan/atau asosiasi atau badan profesional, daripada sistem kualifikasi. Untuk badan-badan kompeten yang mematuhi *ISO/IEC 17024:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi atau perseorangan*, pertimbangan perlu diberikan pada keseimbangan antara beban penilaian serta penilaian ulang dan hasil yang dirasakan untuk kelompok nasional.

Fokus utama dari pengembangan standar adalah memastikan bahwa standar tersebut bersifat relevan dan terkini untuk industri. Tanpa memandang standar yang digunakan, dalam sistem TVET, pengembang menggunakan perwakilan industri sektor swasta dalam pengembangan standar, mendokumentasikan standar-standar ini dalam format yang konsisten, dan memasukkan tahap pengesahan dalam proses.

2. Persetujuan penyedia pelatihan dan/atau penilaian

Persetujuan penyedia pelatihan dan/atau penilaian adalah salah satu fungsi utama dari badan yang kompeten. Namun, proses persetujuan bisa bersifat sukarela atau wajib dan terbatas pada:

- Penyedia swasta, terutama jika persetujuan penyedia publik diambil alih
- Hanya penyedia penilaian, dengan penyedia pelatihan yang menjadi pasar terbuka

Persyaratan persetujuan dapat didokumentasikan dalam panduan, undang-undang atau peraturan, atau standar mutu. Proses persetujuan dapat mencakup penyerahan bukti kunci dan/atau audit atau tinjauan panel.

Selain itu, ada beberapa contoh dalam sistem kualifikasi atau sistem sertifikasi kompetensi di mana layanan penilaian selanjutnya disetujui untuk pihak-pihak di tingkat ketiga, misalnya, untuk masing-masing organisasi atau **individu**. Penerapan ini diistilahkan dengan berbagai pengaturan bisnis, waralaba atau alih daya.³⁵

Untuk beberapa negara yang mengizinkan pengaturan ini, persyaratan dapat dicatat dalam peraturan panduan, atau standar mutu. Misalnya, di Australia persyaratan ini telah ditulis ke dalam standar mutu TVET sejak awal, dan saat ini didokumentasikan dalam undang-undang.

Untuk badan-badan yang kompeten yang mematuhi *ISO/IEC 17024:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi atau perseorangan*, proses alih daya harus mencakup perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum dan badan sertifikasi ada untuk:

- Bertanggung jawab atas semua pekerjaan alih daya
- Memastikan bahwa badan yang melakukan pekerjaan alih daya bersifat kompeten dan mematuhi persyaratan
- Menilai dan memantau kinerja badan-badan ini yang melakukan pekerjaan alih daya
- Menyimpan catatan untuk menunjukkan bahwa badan yang melakukan pekerjaan alih daya memenuhi semua persyaratan
- Menyimpan daftar badan yang melakukan pekerjaan alih daya

3. Pemantauan proses dan ketentuan TVET

Pemantauan proses dan **penyediaan** TVET dapat mencakup evaluasi data indikator mutu (seperti rasio jenis kelamin, rasio guru dan pelajar, hasil melalui tinjauan penilaian pelajar serta perkembangan kualifikasi dan tingkat penyelesaian, hasil pekerjaan, kepuasan pengguna, kelanjutan studi lebih lanjut) dan mengaudit atau mengkaji metodologi sistem manajemen dan pelaksanaan penyedia. Tinjauan audit dapat dilakukan berdasarkan siklus, dengan opsi siklus yang berbeda untuk berbagai kategori penyedia. Audit dapat dijadwalkan dengan berbagai cara, misalnya, sebagai tinjauan utama satu kali atau dilakukan dengan pemberitahuan singkat.

Badan yang kompeten perlu memiliki panduan yang jelas tentang:

- Data yang akan dikumpulkan, termasuk standar data
- Kriteria atau standar mutu untuk penyedia layanan penilaian (yang mungkin termasuk layanan pelatihan) yang dapat diaudit
- Pengaturan pemantauan, dan daftar tindakan yang diambil terhadap penyedia yang berkinerja buruk, misalnya, sanksi dan penutupan

³⁵ ISO/IEC 17024:2012

4. Hasil TVET melalui kontrol, pengawasan atau pemantauan penilaian serta prosedur dan hasil kelulusan

Penjaminan mutu penilaian dapat mengambil berbagai pendekatan dan setiap negara AMS dapat menerapkan pendekatan ini dengan berbagai cara, termasuk:

- Mengontrol penilaian:
 - o Instrumen penilaian yang dikembangkan secara terpusat dan penilaian yang dikelola secara terpusat
 - o Instrumen penilaian yang dikembangkan secara terpusat, penilaian yang dikelola RTO tetapi dinilai secara eksternal
 - o Kombinasi penilaian yang dikembangkan dan dikelola secara eksternal dengan RTO yang dikembangkan dan diberikan penilaian
- Memantau keputusan penilaian:
 - o Kumpulan penilaian dan keputusan penilaian yang terpusat
 - o Penyedia melakukan pemantauan dan pelaporan mandiri
- Mengelola para penilai:
 - o Kriteria untuk kesesuaian dan pengembangan profesional para penilai
 - o Daftar para penilai
 - o Sertifikasi ulang para penilai

Akhirnya, protokol untuk pemberian sertifikat atau kualifikasi dapat bervariasi:

- Badan penerbit/pemberi sertifikasi mengeluarkan sertifikat atau kualifikasi
- Badan penerbit/pemberi sertifikasi menyetujui penyedia untuk menerbitkan atas nama mereka; dengan hasil pelajar yang disimpan di penyedia atau di badan pemberi penghargaan
- Badan penerbit/pemberi sertifikasi menyetujui penyedia untuk menerbitkan sertifikat atau kualifikasi

Untuk badan-badan yang mematuhi *ISO/IEC 17024:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi atau perseorangan*, standar ini mensyaratkan:

- Metode dan mekanisme penilaian yang terdokumentasi, mengakomodasi kebutuhan khusus, memastikan penilaian, dan mematuhi prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas
- Persyaratan yang ditetapkan untuk para penilai dan proses persetujuan dan pemantauan kinerja para penilai
- Tanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat dan memastikan bahwa bukti sudah cukup untuk memberikan sertifikat yang relevan.³⁶

Badan yang kompeten perlu memiliki protokol terdokumentasi yang jelas untuk proses yang terkait dengan pengaturan pemantauan, penilaian dan masalah penghargaan.

5. Evaluasi mutu TVET

Dalam sistem TVET mana pun, ada tuntutan dan kepatuhan yang bersaing, dan lembaga harus mampu meninjau dan mencerminkan sistem, mengidentifikasi dan melaporkan ketidakefisienan secara objektif. Beberapa negara telah membentuk suatu badan untuk memberi nasihat kepada para menteri senior tentang masalah-masalah nasional (atau kekhawatiran) mengenai sistem pelatihan negara tersebut.

Evaluasi memerlukan kemampuan untuk meminta atau menyimpan data indikator mutu, memberikan laporan dan informasi kepada kementerian terkait dan ke lembaga-lembaga lain.

³⁶ Hal ini dikenal sebagai ketertelusuran.

Evaluasi mutu TVET pada tingkat sistem memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai apakah kebijakan TVET memenuhi sasaran atau kebutuhan nasional atau sektoral. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga eksternal. Badan yang kompeten harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan ringkasan laporan yang menguraikan temuan umum dari tinjauan, evaluasi, penilaian mereka.

6. Penyediaan informasi publik

Untuk badan yang kompeten, transparansi adalah prinsip utama dari tata kelola yang baik. Penyediaan informasi publik tentang kinerja badan dan kinerja penyedia harus memberikan keyakinan pada sistem penjaminan mutu.

Badan yang kompeten dapat melaporkan kegiatan melalui berbagai strategi, seperti laporan tahunan, daftar tindakan yang diambil terhadap penyedia, dan pembaruan situs web. Selain itu, bagi mereka yang mematuhi *ISO/IEC 17024:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk badan-badan yang menjalankan sertifikasi atau perseorangan*, standar ini mensyaratkan penyediaan informasi publik yang terkait dengan proses sertifikasi, lingkup skema sertifikasi, dan persyaratan untuk masuk ke skema sertifikasi.

Data indikator mutu

Jaminan mutu TVET bergantung pada ketersediaan, validitas, keandalan data tentang praktik dan hasil TVET (EAS TVET QAF 2012). Untuk dapat memantau kinerja dan memberikan laporan evaluatif sangat bergantung pada sistem yang memiliki pengumpulan data dan standar data yang kuat.

Secara umum, indikator mutu cenderung diklasifikasikan berdasarkan masukan dan keluaran. EAS TVET QAF (2012) mencatat bahwa indikator masukan meliputi:

- dukungan oleh industri, kelompok profesional dan pekerjaan tentang relevansi dan tingkat standar pencapaian TVET
- dukungan oleh penyedia mutu dan utilitas standar pencapaian TVET
- informasi tentang kapasitas dan pengalaman staf penyedia, efektivitas sistem keuangan dan manajemen, dan mutu serta relevansi fasilitas serta peralatan penyedia;
- informasi tentang isi, gaya dan mutu pengiriman penyedia TVET
- informasi tentang penyedia layanan, fasilitas, dan sistem dukungan pelajar
- informasi tentang persyaratan dan prosedur masuk pendaftaran
- pola pendaftaran pelajar dalam kaitannya dengan tujuan kebijakan
- investasi oleh penyedia TVET dan staf dalam pengembangan profesional, peningkatan fasilitas, sistem penjaminan mutu, dan inovasi lainnya
- tingkat dan pola pendaftaran untuk penyedia layanan
- kelengkapan, relevansi dan aksesibilitas sistem informasi; dan,
- mekanisme untuk mengidentifikasi area dan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.' (hlm. 18-19)

Indikator keluaran dicatat sebagai:

- hasil penilaian, dan hasil audit penilaian untuk unit dan kualifikasi
- catatan penyampaian program, kegiatan pelajar dan penilaian pelajar
- tingkat penyelesaian pelajar, tingkat kepuasan, dan tujuan – termasuk tingkat pekerjaan, dan tingkat untuk berbagai kelompok sosial dan pekerjaan/industri
- informasi tentang penggunaan keterampilan di tempat kerja
- kepuasan pengusaha dan pengguna lainnya dengan hasil lulusan, dan
- bukti ketepatan sistem informasi, sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan identifikasi kebutuhan kelompok rentan dan/atau sosial lainnya (hlm. 19).

Badan yang kompeten harus memiliki strategi untuk pengumpulan data sesuai dengan standar data yang disepakati untuk memungkinkannya melakukan fungsi evaluasi dan pelaporan.

Kerangka internasional

Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN mengharuskan AMS ketika merujuk untuk memaparkan sistem penjaminan mutu nasional untuk pendidikan, dan pelatihan mengacu pada kerangka atau sistem kualifikasi nasional. Hal ini mengusulkan tiga kerangka penjaminan mutu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk proses pembuatan referensi:

- Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN
- Kerangka Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan KTT Asia Timur (EAS TVET QAF)
- INQAHE Panduan Praktik yang Baik dalam Penjaminan Mutu.

Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN akan berfungsi sebagai titik referensi umum untuk lembaga penjaminan mutu dan lembaga pendidikan tinggi ketika mereka mengusahakan harmonisasi di tengah keragaman sistem pendidikan tinggi, budaya dan tradisi di kawasan ini. Kerangka ini menggunakan prinsip-prinsip umum dan pernyataan praktik yang baik.

Kerangka Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan KTT Asia Timur (EAS TVET QAF) memberikan dasar untuk membantu ekonomi anggota dalam mengkaji atau membangun sistem penjaminan mutu yang kuat. Kerangka ini memiliki alat penilaian mandiri yang juga mencakup proses bertahap untuk mengembangkan rencana aksi.

INQAHE Panduan Praktik yang Baik dalam Penjaminan Mutu bertujuan untuk mempromosikan praktik yang baik untuk penjaminan mutu internal dan/atau eksternal. Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh semua lembaga penjaminan mutu, apa pun tahap perkembangannya.

Informasi lebih lanjut tentang tiga kerangka ini disertakan dalam Lampiran.

Pertukaran internasional

Sebagaimana dalam sistem apa pun, memberikan informasi yang transparan dan jelas tentang proses penjaminan mutu dari badan yang kompeten kepada orang lain, baik secara nasional maupun internasional, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pada sistem AMS TVET.

Lingkup informasi harus dipertimbangkan oleh badan kompeten AMS untuk dimasukkan di situs web mereka, dalam bahasa nasional dan bahasa Inggris.³⁷

- Undang-undang yang berkaitan dengan lembaga sertifikasi dan perannya; setiap undang-undang atau peraturan, panduan yang terkait dengan proses-proses utama
- Kerangka keterampilan dan hubungannya dengan NQF (jika berlaku)
- Skema sertifikasi (atau kerangka kualifikasi), standar pelatihan terkait dan persyaratan sertifikasi ulang apa pun
- Strategi penjaminan mutu yang didokumentasikan dalam panduan atau tinjauan umum, termasuk proses pengembangan dan persetujuan untuk skema sertifikasi, proses persetujuan untuk penyedia pelatihan dan/atau penilaian, pengaturan pemantauan
- Registrasi penyedia pelatihan dan/atau penilaian, tambahan tempat penilaian alih daya, dan

³⁷ Menjadi bahasa resmi ASEAN.

para penilai (jika ada)

- Laporan data dan kegiatan, termasuk sanksi atau penutupan
- Laporan evaluasi sistem TVET

Selain itu, tautan ke data pasar kerja dan proses pengakuan untuk tenaga kerja internasional atau mobilitas pelajar dapat disertakan dalam informasi publik.

Bab 4:

Prinsip Panduan dan Protokol untuk Penjaminan Mutu



Bab 4: Prinsip Panduan dan Protokol untuk Penjaminan Mutu

Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS) akan menerapkan sistem penjaminan mutu mereka untuk TVET dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dan dengan berbagai tingkat pelaksanaan. Untuk memfasilitasi saling pengertian dan kepercayaan dalam pendekatan penjaminan mutu TVET masing-masing Negara Anggota ASEAN, serangkaian prinsip dan protokol bersama telah disepakati untuk:

- Badan yang kompeten. Badan yang kompeten secara prinsip bertanggung jawab atas semua atau beberapa aspek sistem sertifikasi kompetensi. Badan yang kompeten dapat berupa badan kualifikasi, yaitu badan yang bertanggung jawab atas pengembangan/dukungan standar pekerjaan, badan penerbit atau badan sertifikasi kompetensi.
- Penyedia layanan penilaian. Penyedia adalah mereka yang menyediakan layanan penilaian (dan mungkin layanan pelatihan) dan juga dapat menjadi lembaga penerbit atau badan sertifikasi kompetensi.

Badan yang kompeten

1. Prinsip-prinsip panduan untuk badan yang kompeten

Prinsip-prinsip berikut ini mendukung proses penjaminan mutu dan mutu yang digunakan secara perseorangan dan kolektif oleh masing-masing badan yang kompeten.

Tata kelola

Badan-badan yang kompeten telah secara jelas mendokumentasikan pengaturan tata kelola yang menetapkan tanggung jawab dan praktik, kebijakan, dan prosedur, yang dilakukan oleh eksekutif lembaga, untuk memberikan arahan strategis, untuk memastikan tercapainya tujuan, untuk mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

Akuntabilitas

Badan yang kompeten memiliki kerangka hukum atau pelaporan untuk mengevaluasi praktik dan kinerjanya terhadap kriteria yang ditetapkan. Badan yang kompeten harus memastikan bahwa hasil dari penjaminan mutu serta kegiatan peninjauan mutu dilaporkan kepada publik setidaknya setiap tahun.

Transparansi

Badan yang kompeten memberikan informasi yang akurat dan jelas sehubungan dengan fungsi-fungsi utamanya, termasuk proses, standar, dan kinerja.

Independensi

Badan-badan yang kompeten memiliki mandat, panduan, proses dan praktik yang memastikan independensi dari berbagai elemen sistem penjaminan mutu, penghindaran konflik kepentingan, dan independensi pengambilan keputusan.

Keyakinan dan standar

Badan yang kompeten memiliki proses dan praktik untuk memberi keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa standar-standar (baik masukan maupun keluaran) telah terpenuhi.

Perbaikan yang berkesinambungan

Pendekatan penjaminan mutu badan yang kompeten memastikan penggunaan keseimbangan strategi yang meningkatkan penyediaan layanan untuk memenuhi perubahan dan kebutuhan masa depan kelompok pemangku kepentingan.

Proporsionalitas

Badan yang kompeten memiliki penjaminan mutu dan pendekatan peninjauan mutu yang sesuai untuk tujuan dan mencerminkan konteks dan keragaman AMS.

Fleksibilitas layanan

Badan yang kompeten memastikan bahwa protokol sudah ada secara nasional untuk memfasilitasi layanan penilaian atau proses pengakuan untuk pelamar nasional atau internasional.

Kolaborasi

Badan yang kompeten berkolaborasi dengan badan yang kompeten lainnya, secara nasional dan internasional.

2. Protokol panduan untuk badan yang kompeten

Badan yang kompeten mengamati protokol-protokol berikut ini dalam mengelola kegiatan penjaminan mutu dan peninjauan mutunya.

1. Badan yang kompeten mendokumentasikan dan menerapkan sistem manajemen mutu untuk menangani semua fungsinya, termasuk:
 - Persetujuan dan pemantauan terhadap standar pencapaian yang mencakup partisipasi sektor industri
 - Persetujuan, pemantauan³⁸ dan evaluasi penyedia pelatihan dan/atau layanan penilaian berdasarkan kriteria atau standar
 - Pemantauan hasil penilaian
 - Penerbitan sertifikat
 - Manajemen catatan termasuk standar data
 - Keamanan data
 - Alih daya³⁹
 - Penanganan keluhan
 - Kewajiban pelaporan
 - Peningkatan berkesinambungan dan tinjauan internal.
2. Badan yang kompeten mempublikasikan proses penjaminan mutunya, baik dalam bahasa nasional maupun bahasa Inggris.
3. Badan yang kompeten mengelola kinerja penyedia layanan penilaian melalui mekanisme seperti insentif dan sanksi eksplisit.
4. Badan yang kompeten mengelola daftar publik untuk penyedia layanan pelatihan dan/atau penilaian yang disetujui, dan untuk standar pencapaian seperti skema atau kualifikasi sertifikasi kompetensi.
5. Suatu badan yang kompeten membuat protokol untuk pertukaran internasional, termasuk komitmen untuk memelihara komunikasi dengan lembaga yang kompeten secara nasional dan internasional, serta berpartisipasi dalam forum internasional, pertukaran pengembangan kapasitas dan kegiatan penentuan tolok ukur.
6. Badan yang kompeten berkomitmen untuk melakukan tinjauan eksternal atas kinerjanya berdasarkan siklus dan mengumumkan temuan-temuan tinjauan tersebut.

³⁸ Pemantauan dapat mencakup: pelaporan hasil pelajar dan/atau pengumpulan dan analisis data umpan balik pemangku kepentingan; pengawasan; audit, dll.

³⁹ Sistem kualifikasi atau skema sertifikasi kompetensi di mana layanan penilaian selanjutnya disetujui untuk para pihak di tingkat ketiga, mis., ke organisasi perseorangan atau situs perseorangan. Penerapan ini diistilahkan dengan berbagai pengaturan bisnis, waralaba atau alih daya.

Penyedia layanan penilaian

1. Prinsip-prinsip panduan untuk penyedia

Prinsip-prinsip berikut ini mendukung proses penjaminan mutu dan peninjauan mutu yang digunakan oleh masing-masing penyedia layanan penilaian, misalnya, penyedia penilaian, atau penyedia pelatihan dan penilaian.

Tata kelola

Penyedia telah dengan jelas mendokumentasikan tujuan dan sasaran, pengaturan tata kelola, dan langkah-langkah kejujuran untuk memenuhi persyaratan dan legislasi badan kompeten yang relevan.

Mereka harus memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasinya.

Akuntabilitas

Penyedia memantau dan mengevaluasi praktik dan kinerjanya terhadap persyaratan yang ditetapkan badan kompeten dan menggunakan umpan balik pemangku kepentingan klien. Penyedia harus memastikan bahwa hasil dari kegiatan penjaminan mutu dan peninjauan mutu dilaporkan kepada publik.

Transparansi

Penyedia memiliki informasi yang akurat dan jelas sehubungan dengan penilaian mereka dan layanan dukungan untuk klien.

Independensi

Penyedia memastikan bahwa mereka melakukan layanan mereka (mis., penilaian) dengan tidak memihak, dengan menghindari konflik kepentingan dan memastikan independensi pengambilan keputusan, terutama keputusan hasil penilaian.

Keyakinan dan standar

Penyedia memiliki proses dan praktik yang memastikan bahwa layanan yang dilakukan sendiri atau atas nama mereka memenuhi standar dan harapan yang diperlukan. Proses dan praktik penyedia harus memberikan jaminan kepada lembaga yang kompeten dan pemangku kepentingannya bahwa standar pencapaian perseorangan telah dipenuhi.

Perbaikan yang berkesinambungan

Proses dan praktik penyedia menyeimbangkan persyaratan kepatuhan dan proses peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan mereka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan klien.

Proporsionalitas

Pendekatan penjaminan mutu dan peninjauan mutu penyedia cocok untuk tujuan dan difokuskan untuk memastikan hasil yang bermutu.

Fleksibilitas layanan

Penyedia memastikan bahwa hambatan untuk layanan penilaian untuk pelamar nasional atau internasional diminimalkan.

2. Protokol panduan untuk penyedia layanan

Penyedia mengamati protokol-protokol berikut ini dalam mengelola kegiatan penjaminan mutu dan peninjauan mutu.

1. Penyedia mendokumentasikan dan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk memastikan bahwa ia menyediakan layanan penilaian mutu, termasuk:
 - Memastikan sumber daya penilaian yang tepat, sumber daya fisik cocok untuk skema atau program sertifikasi kompetensi
 - Memastikan tingkat staf kompeten yang tepat untuk layanan penilaiannya, termasuk pengembangan profesional
 - Memastikan layanan dukungan penilai yang tepat
 - Memantau layanan melalui umpan balik klien dan pemangku kepentingan
 - Hasil penilaian yang valid dan dapat diandalkan
 - Penerbitan kualifikasi atau sertifikat (jika berlaku)
 - Manajemen catatan
 - Keamanan data
 - Pengaturan alih daya
 - Penanganan keluhan klien
 - Kewajiban pelaporan
 - Peningkatan berkesinambungan dan tinjauan internal.
2. Penyedia bertanggung jawab atas semua layanan penilaian yang dilakukan atas namanya. Penyedia memiliki daftar publik untuk kampus-kampusnya, pusat-pusat penilaian atau tempat-tempat dan menyediakan informasi publik tentang kinerja situs-situs ini.
3. Penyedia menerapkan strategi akses dan kesetaraan dalam penyediaan layanan, termasuk, persyaratan masuk inklusif, dukungan untuk klien penyandang cacat dalam pembelajaran dan/atau penilaian, pengakuan pembelajaran sebelumnya,⁴⁰ dan mengakui penilaian yang dilakukan oleh penyedia layanan yang terjamin mutunya atau badan yang kompeten lainnya
4. Penyedia menerapkan proses dan praktik untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya.
5. Penyedia menerapkan prosedur untuk meminimalkan hambatan terhadap layanan penilaian termasuk memberikan penilaian secara berkala, bahwa biayanya masuk akal dan transparan serta tidak membatasi akses ke, atau penyediaan dari, layanan.
6. Penyedia membuat protokol untuk menjaga komunikasi dengan badan yang kompeten dan penyedia lainnya, serta berpartisipasi dalam kegiatan penentuan tolok ukur dan/atau moderasi penilaian.
7. Penyedia bertanggung jawab atas pemeliharaan kepatuhannya dengan standar mutu. Penyedia melakukan pendekatan peningkatan berkelanjutan untuk layanan penilaiannya. Penyedia tunduk pada tinjauan eksternal terhadap kinerjanya, yang temuannya dipublikasikan.

⁴⁰ Ini juga dapat disebut pengakuan kompetensi saat ini.

Bab 5:

Prinsip Panduan dan Protokol untuk Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi di antara Negara-Negara Anggota ASEAN

Bab 5: Prinsip Panduan dan Protokol untuk Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi di antara Negara-Negara Anggota ASEAN

Bagaimana mutu badan yang kompeten menjamin TVET sangat bervariasi dari satu negara ke negara. Terdapat tekanan yang semakin besar dari mobilitas pekerja dan pelajar, keterlibatan ASEAN di Area Perdagangan Bebas termasuk seruan untuk memperluas perjanjian saling pengakuan, dan untuk memfasilitasi pengakuan pelajar dan pekerja terampil di lintas batas tradisional. Tekanan-tekanan ini telah menyebabkan perlunya badan yang kompeten guna memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana mutu negara menjamin TVET, untuk mencapai beberapa komparabilitas harapan, untuk berhubungan dengan badan kompeten AMS lainnya, dan untuk mengenali badan kompeten AMS lainnya.

Saat ini, beberapa badan kompeten AMS telah mencari MOU dengan badan-badan lain dan telah berupaya meningkatkan dialog di seluruh AMS. Sebagai kelompok, AMS bertujuan untuk menyediakan struktur bersama dan beberapa konsistensi dalam aplikasi yang mengakui sistem sertifikasi kompetensi, dan pada gilirannya badan yang kompeten. Namun, hal ini tidak berarti bahwa skema sertifikasi kompetensi spesifik secara otomatis diakui atau bahwa seseorang yang dinilai dan disertifikasi oleh satu badan yang kompeten akan secara otomatis diakui oleh badan yang kompeten lainnya. Ini mungkin berarti bahwa penilaian atau pekerjaan yang dilakukan oleh satu badan yang kompeten akan diakui dan seseorang mungkin perlu mencari penilaian tambahan untuk pengakuan formal, perizinan atau tujuan profesional.

Prinsip-prinsip panduan untuk pengakuan

Prinsip-prinsip berikut ini mendukung pengakuan sistem sertifikasi kompetensi:

Kedaulatan

Negara-negara anggota menghormati struktur dan proses penjaminan mutu spesifik setiap negara yang berdaya tanggap terhadap prioritas nasional.

Komparabilitas

Negara-negara anggota menggunakan tolok ukur untuk menentukan komparabilitas sistem penjaminan mutu daripada mencari atau mengambil alih kesamaan struktur dan proses. Sistem penjaminan mutu harus secara fleksibel beradaptasi dengan pembangunan nasional dan global serta harus konsisten dalam penerapan lembur untuk memungkinkan perbandingan dan meningkatkan keyakinan.

Transparansi

Negara-negara anggota mempromosikan transparansi standar dan ukuran mutu mereka, serta hasil dari proses penentuan tolok ukur atau pembuatan referensi.

Akuntabilitas

Negara-negara anggota mendorong evaluasi dan pelaporan dari kinerja badan yang kompeten terhadap tolok ukur internasional yang disepakati.⁴¹ Evaluasi mencakup konsultasi dengan mitra dan pemangku kepentingan yang menghasilkan laporan publik.

Perbaikan yang Berkesinambungan

Negara-negara anggota menghormati tingkat pelaksanaan dari sistem penjaminan mutu suatu negara dengan pemahaman bahwa sistem ini didasarkan pada pendekatan peningkatan berkesinambungan.

⁴¹ pedoman INQAAHE, EAS TVET QAF, Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN

Protokol panduan untuk pengakuan

Untuk memastikan bahwa proses pengakuan sistem sertifikasi kompetensi dilakukan secara efektif, transparan, dan dengan cara yang konsisten dan koheren di seluruh AMS, protokol-protokol berikut ini telah disepakati:

1. Setiap badan kompeten AMS yang berpartisipasi menyepakati tolok ukur untuk mengevaluasi sistem sertifikasi kompetensi AMS.
2. Struktur sistem sertifikasi kompetensi di setiap AMS dipaparkan berdasarkan tolok ukur yang disepakati.
3. Dasar hukum dan tanggung jawab masing-masing badan kompeten terkait diuraikan. Jika ada lebih dari satu badan yang kompeten dalam AMS, hubungannya dijelaskan.
4. Untuk masing-masing skema sertifikasi kompetensi yang relevan, kaitan yang jelas dan yang dapat ditunjukkan dibuat dengan deskriptor tingkat (jika ada) dari sistem sertifikasi kompetensi AMS yang berpartisipasi. Kaitan dengan NQF (jika ada) dan deskriptor tingkat AQRD dijelaskan.
5. Pendekatan penjaminan mutu dari masing-masing lembaga yang kompeten ditentukan tolok ukurnya dengan kriteria yang disepakati. Kriteria sebagaimana diuraikan dalam tolok ukur yang disepakati akan menjadi dasar kegiatan. Sebagai contoh:
 - Untuk setiap badan yang kompeten, prosedur persetujuan skema sertifikasi kompetensi dan persetujuan serta pemantauan pelatihan dan/atau penyedia penilaian diuraikan.
 - Manajemen dan pemantauan penilai dan keputusan penilaian.
6. Kegiatan ini dilakukan secara kolektif dan mencakup peserta independen yang berpengalaman dalam penjaminan mutu dari skema sertifikasi kompetensi.
7. Proses menghasilkan satu laporan yang disepakati, termasuk:
 - Menyiapkan proses yang dilakukan, temuan kegiatan pengakuan, mengidentifikasi tingkat komparabilitas, dan tingkat pengakuan yang disepakati
 - Tindakan untuk mencari peningkatan komparabilitas antara sistem-sistem sertifikasi kompetensi AMS yang berpartisipasi didokumentasikan dan disepakati bersama.
 - Jika kegiatan pengakuan menghasilkan tingkat komparabilitas yang tinggi, masing-masing badan yang kompeten berkomitmen untuk secara terbuka mengakui pengakuan tersebut.
8. Laporan pengakuan dipublikasikan kepada setiap AMS yang berpartisipasi. Laporan yang diperbarui disediakan sesuai kebutuhan.

Bab 6:

Berpartisipasi dalam Kegiatan Pembuatan Referensi Nasional

Bab 6: Berpartisipasi dalam Kegiatan Pembuatan Referensi Nasional

Latar Belakang

Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQRF) adalah kerangka acuan umum regional. AQRF berfungsi sebagai perangkat untuk memungkinkan perbandingan kualifikasi di seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.

Proses pembuatan referensi adalah proses nasional yang otonom di mana para pemangku kepentingan dan otoritas nasional yang relevan menyepakati hubungan antara setiap tingkat kualifikasi nasional dan tingkat dalam AQRF. Hubungan antara tingkat kualifikasi nasional dan tingkat AQRF ini adalah hasil dari proses pembuatan referensi dan memungkinkan hubungan lebih lanjut, melalui AQRF, ke tingkat kualifikasi di AMS lainnya. Sebagai contoh, hal ini bersifat mungkin untuk melihat semua tingkat nasional yang terkait dengan tingkat AQRF tertentu dan ini akan memungkinkan perbandingan kualifikasi dari berbagai negara yang semuanya terkait dengan tingkat AQRF yang sama.

Secara khusus, proses pembuatan referensi diharapkan untuk memasukkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang hubungan yang diusulkan antara tingkat NQF dan tingkat AQRF di setiap Negara Anggota, melaporkan hasil referensi nasional kepada Komite AQRF yang diusulkan, terlibat dalam tinjauan sejawat (*peer review*) dengan Komite dan akhirnya melaporkan hubungan resmi tunggal NQF Negara Anggota dengan AQRF. Proses ini berpotensi kompleks dan melibatkan pekerjaan teknis dengan dimensi sosio-politik yang besar.

Untuk memastikan bahwa proses dilakukan secara efektif, transparan dan dengan cara yang konsisten dan koheren di seluruh komunitas ASEAN, AQRF mencakup sebelas kriteria yang telah disepakati untuk mempromosikan proses bersama. Kriteria ini tercantum di bawah ini.

1. Struktur sistem pendidikan dan pelatihan dipaparkan.
2. Tanggung jawab dan dasar hukum dari semua badan nasional terkait yang terlibat dalam proses pembuatan referensi ditentukan dengan jelas dan diterbitkan oleh otoritas publik utama yang bertanggung jawab atas proses pembuatan referensi.
3. Prosedur untuk memasukkan kualifikasi dalam kerangka kualifikasi nasional atau untuk menggambarkan tempat kualifikasi dalam sistem kualifikasi nasional bersifat transparan.
4. Terdapat hubungan yang jelas dan dapat dibuktikan antara tingkat kualifikasi dalam kerangka atau sistem kualifikasi nasional dan deskriptor tingkat AQRF.
5. Dasar dalam standar yang disepakati dari kerangka nasional atau sistem kualifikasi dan kualifikasinya dipaparkan.
6. Sistem penjaminan mutu nasional untuk pendidikan dan pelatihan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional atau sistem diuraikan. Semua badan yang bertanggung jawab untuk penjaminan mutu menyatakan dukungan tegas mereka untuk hasil pembuatan referensi.
7. Proses referensi telah dirancang oleh otoritas publik utama dan telah disahkan oleh para pemangku kepentingan utama dalam sistem kualifikasi.
8. Orang-orang dari negara lain yang berpengalaman dalam bidang kualifikasi terlibat dalam proses pembuatan referensi dan pelaporannya.
9. Satu laporan komprehensif, yang menetapkan pembuatan referensi dan bukti yang mendukungnya harus diterbitkan oleh badan-badan nasional yang kompeten dan harus membahas secara terpisah dan teratur masing-masing kriteria pembuatan referensi.
10. Hasil pembuatan referensi diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN dan oleh badan publik nasional utama.

11. Setelah proses pembuatan referensi, semua badan pemberi dan penerbit sertifikasi didorong untuk menunjukkan referensi yang jelas pada tingkat AQRF yang sesuai pada sertifikat kualifikasi baru, dan ijazah yang diterbitkan.

AQRF memang menyediakan bahasa yang sama untuk digunakan dalam proses referensi dan untuk saling memahami sistem kualifikasi dan sertifikasi kompetensi satu sama lain. Badan-badan yang kompeten perlu menyediakan kaitan antara persyaratan yang digunakan dalam sistem sertifikasi kompetensi mereka dan persyaratan AQRF ketika mereka berpartisipasi dalam proses pembuatan referensi.

Konteks

Sistem sertifikasi kompetensi AMS dikaitkan dengan atau dimasukkan dalam setiap kerangka kualifikasi nasional AMS dan sistem kualifikasi masing-masing. Walaupun sistem sertifikasi kompetensi AMS dalam Panduan ini berhubungan khusus dengan struktur sektor publik, hal ini tidak menghalangi struktur sektor swasta (mis., perusahaan) untuk terlibat dalam proses pengakuan.

Untuk AMS tanpa kerangka kualifikasi nasional, diakui bahwa sistem sertifikasi kompetensi ini memiliki peran eksplisit dalam pengembangan sumber daya manusia dari masing-masing AMS. Untuk sistem ini, persyaratan kontekstual utama harus ada untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan referensi, seperti:

- Untuk kerangka keterampilan, adakah deskriptor tingkat yang menguraikan kompleksitas keterampilan dan pengetahuan?
- Apakah skema sertifikasi didasarkan pada hasil belajar?
- Apakah ada satu atau lebih badan yang kompeten yang mengawasi sistem sertifikasi kompetensi? Jika ada lebih dari satu badan yang kompeten, siapa yang akan memimpin proses?
- Apakah ada sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi dan dilaksanakan dengan jelas yang dipahami oleh para pemangku kepentingan?
- Bisakah hubungan dibangun antara kerangka keterampilan dan NQF?

Panduan Referensi AQRF (naskah 2015) menunjukkan beberapa prasyarat penting yang perlu dipertimbangkan oleh masing-masing Negara Anggota sebelum melakukan pembuatan referensi resmi, termasuk:

- AQRF dipandang di negara ini sebagai peningkatan untuk kerja sama regional; ada proses yang sedang berlangsung untuk menyebarluaskan dan memeriksa persepsi dan nilai (atau sebaliknya) dari AQRF.
- Pengembangan kapasitas sedang dilakukan yang berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan AQRF, termasuk pembuatan portal resmi dan tingkat konsultasi dengan berbagai lembaga dan badan.
- Tata kelola dan struktur manajemen sudah ada atau sedang dirumuskan; ini termasuk menentukan tanggung jawab untuk pembuatan referensi dan membentuk komite yang kompeten.
- Penjaminan mutu dalam sistem kualifikasi bersifat efektif, meninjau sistem penjaminan mutu saat ini guna menyertakan penggunaan hasil belajar dan NQF.
- Memastikan hubungan dengan konteks lain untuk penjaminan mutu bersifat jelas; mempertimbangkan bagaimana sistem penjaminan mutu nasional, misalnya, untuk standar desain program, berhubungan dengan struktur dan prinsip AQRF.
- Ada kesadaran yang meningkat tentang proyek-proyek terkait, misalnya, MRA dan penyelarasan lainnya ditambah pemahaman saling ketergantungan AQRF dengan proyek-proyek yang relevan, yang perlu dicakup dan dipahami.

Badan-badan yang kompeten perlu mempertimbangkan bagaimana mereka disertakan dalam proses pembuatan referensi formal untuk memberikan tingkat pengakuan dan manfaat terbesar bagi para klien mereka.

Bagaimana kaitan Panduan ini dengan AQRF dan harmonisasi?

Suatu negara atau wilayah menggunakan serangkaian strategi untuk memfasilitasi pengakuan keterampilan untuk mobilitas pekerja dan pelajar. Itu adalah bauran dari strategi-strategi ini yang memberikan keyakinan pada keputusan yang dibuat oleh penyedia layanan penilaian.

1. AQRF, kegiatan referensi dan laporan nasional memberikan langkah awal dalam membangun kepercayaan dengan AMS. Laporan pembuatan referensi AMS mencakup informasi tentang NQF negara atau QF sektor pendidikan, hubungan tingkat NQF dengan tingkat AQRF, dan memberikan gambaran umum tentang pengaturan penjaminan mutu terhadap tolok ukur yang disepakati. Badan - badan yang kompeten, institusi, dan pengusaha yang tertarik dapat menggunakan informasi ini untuk menginformasikan praktik pengakuan mereka dengan lebih baik.
2. AMS juga mengembangkan perjanjian saling pengakuan untuk berbagai pekerjaan dan keterampilan. Perjanjian ini mencakup standar kerja regional untuk AMS untuk digunakan sebagai titik referensi guna mengembangkan standar kompetensi dan kualifikasi. MRA memberikan komparabilitas standar kompetensi yang digunakan dalam setiap AMS dan program pembelajaran terkait (mis., kualifikasi).
3. Panduan ini membentuk dasar dari pemahaman tentang penjaminan mutu oleh badan-badan yang kompeten. Mereka menjabarkan prinsip dan protokol untuk lembaga yang kompeten dan untuk penyedia layanan penilaian. Panduan ini mensyaratkan badan kompeten AMS untuk melakukan evaluasi internal dan eksternal serta untuk menjamin mutu penyediaan layanan penilaian melalui penyediannya.

Dengan strategi ini di terapkan dan informasi yang dipublikasikan, badan yang kompeten, institusi dan pengusaha akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pengakuan.

Lampiran: Kerangka Penjaminan Mutu Internasional

Kriteria referensi AQRF 6 menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu nasional untuk pendidikan dan pelatihan mengacu pada kerangka kualifikasi atau sistem kualifikasi nasional yang diuraikan. Laporan pembuatan referensi perlu menjelaskan sistem penjaminan mutu nasional utama yang beroperasi dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi. AQRF mengusulkan tiga kerangka penjaminan mutu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk proses pembuatan referensi:

- **INQAAHE Panduan Praktik yang Baik dalam Penjaminan Mutu**
- **Kerangka Penjaminan Mutu KTT Asia Timur TVET**
- **Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN.**

INQAAHE Panduan Praktik yang Baik dalam Penjaminan Mutu

Panduan INQAAHE bertujuan untuk mempromosikan praktik yang baik untuk penjaminan mutu internal dan/atau eksternal. Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh semua lembaga penjaminan mutu. Panduan INQAAHE fokus pada peran lembaga penjaminan mutu eksternal (EQAA). Panduan ini membahas bidang-bidang berikut ini:

- EQAA: akuntabilitas, transparansi, dan sumber daya
 - o Pemerintahan
 - o Sumber daya
 - o QA dari EQAA
 - o Pelaporan informasi publik.
- Institusi pendidikan tinggi dan EQAA: hubungan, standar, dan tinjauan internal
 - o Hubungan antara EQAA dan Institusi Pendidikan Tinggi
 - o Persyaratan EQAA untuk Kinerja Institusi/Program
 - o Evaluasi Diri dan Pelaporan Persyaratan Institusi EQAA ke EQAA
- Tinjauan EQAA tentang institusi: evaluasi, keputusan, dan banding
 - o Evaluasi Institusi dan/atau Program EQAA
 - o Keputusan
 - o Banding
 - o Kegiatan eksternal: kolaborasi dengan lembaga lain dan pendidikan lintas batas/lintas negara
 - o Kolaborasi
 - o Pendidikan Tinggi Transnasional/Lintas Batas.

Kerangka Penjaminan Mutu KTT Asia Timur TVET

Kerangka Penjaminan Mutu EAS TVET berfungsi sebagai kerangka penjaminan mutu referensi umum. Kerangka ini tidak menggantikan atau mencoba untuk mendefinisikan sistem penjaminan mutu nasional, melainkan bertujuan untuk mendukung dan membimbing inisiatif dalam kaitannya dengan penjaminan mutu di tingkat lembaga nasional.

EAS TVET QAF didukung oleh lima prinsip utama berikut ini:

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Pendekatan Perbaikan yang Berkesinambungan
- Fleksibilitas dan Daya Tanggap
- Komparabilitas

Standar mutu Kerangka Penjaminan Mutu EAS TVET beroperasi di dua tingkat dan mencakup persyaratan kelembagaan dan persyaratan penyedia yang disarankan. Kerangka tersebut meliputi:

- Standar penjaminan mutu untuk lembaga
- Contoh standar penjaminan mutu untuk penyedia

Standar mutu lembaga dan standar mutu penyedia dipaparkan dalam hal:

- Tata kelola
- Persetujuan dan pemantauan penyedia, dan
- Persetujuan dan pemantauan standar pencapaian, misalnya kualifikasi, skema sertifikasi

Kerangka ini juga mencakup indikator mutu guna mendukung evaluasi dan proses peningkatan berkelanjutan dari lembaga dan penyedia. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor TVET suatu negara di tingkat nasional dan penyedia.

EAS TVET QAF menyediakan persyaratan berikut ini untuk indikator mutu.

Tabel 7: Indikator mutu, EAS TVET QAF

Aspek				
	Konteks	Masukan	Proses	Keluaran/Produk
Tema	C.1 Ciri Pembelajar	I.1 Sumber dan dukungan pembelajaran	P.1 Pelatihan dan Penilaian	O,1 Kemajuan dan Pencapaian Pembelajar
	C.2 Ciri Penyedia			
	C.3 Jalur Pembelajaran	I.2 Desain program dan pengembangan kurikulum		O,2 Komparabilitas standar prestasi
	C.4 Pengakuan pembelajaran sebelumnya dalam semua konteks	I.3 Mutu Staf Pengajar		O,3 Tujuan lulusan
	C.5 Pengaruh pasar tenaga kerja			O,4 Kepuasan pemangku kepentingan

Sumber: EAS TVET QAF 2012

Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN

Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN akan berfungsi sebagai titik referensi umum untuk lembaga dan institusi penjaminan mutu ketika mereka mengusahakan harmonisasi di tengah keragaman sistem penjaminan mutu, budaya dan tradisi di kawasan ini.

Kerangka ini menggunakan prinsip-prinsip umum dan pernyataan praktik yang baik. Kerangka ini tidak bersifat preskriptif; tujuannya adalah untuk mempromosikan praktik-praktik penjaminan mutu internal dan eksternal yang baik.

Kerangka ini didasarkan pada empat kuadran:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Eksternal (EQAA)
2. Proses Penjaminan Mutu Eksternal (EQA)
3. Penjaminan Mutu Kelembagaan
4. Kerangka Kualifikasi Nasional'

Kuadran-kuadran ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam kriteria-kriteria.

Referensi

ASEAN (2007), *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada Agustus 2015 via <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>

ASEAN (2007), *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*

ASEAN *Qualifications Reference Framework* (2015), Sekretariat ASEAN, Jakarta.

ASEAN *Qualifications Reference Framework Referencing Guidelines* (draft 2015), Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Australian Government 2007, *Building Better Governance*, Persemakmuran Australia, Canberra.

Australian/New Zealand Standard (AS/NZS) *ISO 9000:2006: Quality Management Systems — Fundamentals and vocabulary*, Juni 2006.

Bateman, A & Coles, M 2015, *ASEAN Qualifications Reference Framework and National Qualifications Frameworks: State of Play*, SHARE - Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Bateman, A, Keating, J, Gillis, S, Dyson, C, Burke, G & Coles, M (2012), *Concept Paper: East Asia Summit Vocational Education and Training Quality Assurance Framework, Volume II*, Pemerintah Australia, Canberra.

CEDEFOP (2011), *Glossary: Quality in education and training*, Kantor Uni Eropa, Luksemburg.

Coles, M, Keevy, J, Bateman, A and Keating, J. (2014), 'Flying Blind: policy rationales for national qualifications frameworks and how they tend to evolve', *International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning*, Volume 7, Issue 1 (2014).

Coles, M. and Werquin, P. (2006), *Qualification System: Bridges to lifelong learning*, OECD, Paris.

Gillis, S & Bateman, A (2015), *The Code of Professional Practice for Assessment Quality Management*, Pemerintah Australia, Canberra.

INQAAHE *Guidelines of Good Practice in Quality Assurance* (2007), Sekretariat INQAAHE.

International Labour Office (2016), *Updated guidelines for development of Regional Model Competency Standards*, Kantor ILO, Jenewa.

ISO/IEC 17024:2012, *Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons*, ISO, Swiss.

Principles and Statements of ASEAN Quality Assurance Framework (draft 2015) Sekretariat ASEAN, Jakarta.

UNESCO (2012), *Asia-Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education*, UNESCO Bangkok.

World Bank Group (draft 2015), *NQFs and competency standards in the East Asia-Pacific region: Synthesis report*, Grup Bank Dunia, Washington.

Badan yang Kompeten dari Negara-Negara Anggota ASEAN

Brunei Darussalam

Menteri Pendidikan - <http://moe.gov.bn/bdnac>

Kamboja

Badan Pelatihan Nasional - <http://www.ntb.gov.kh/>

Indonesia

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) www.bnsf.go.id
Kementerian Ketenagakerjaan (koordinasi pengembangan standar kompetensi nasional)
www.naker.go.id

Laos

Departemen Pengembangan Keterampilan dan Ketenagakerjaan (DoSDE)
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial Laos - www.molsw.gov.la/

Malaysia

Badan Kualifikasi Malaysia (MQA) - www.mqa.gov.my Departemen Pengembangan Keterampilan Malaysia (DSD) - www.dsd.gov.my

Myanmar

Otoritas Standar Keterampilan Nasional - www.nesdmyanmar.org

Filipina

Otoritas Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan Teknis (TESDA) -
<http://www.tesda.gov.ph/>

Singapura

Kementerian Pendidikan Singapura - www.moe.gov.sg

Thailand

Departemen Pengembangan Keterampilan - www.dsd.go.th

Vietnam

Departemen Pengembangan Keterampilan, Direktorat Jenderal Pelatihan Kejuruan, Departemen Tenaga Kerja, *Invalids* dan Urusan Sosial - <http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Home.aspx>

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS



@ASEAN



ASEAN



ASEAN



www.asean.org